



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.445, 2018

KEJAKSAAN. Renja Tahun 2018.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-001/A/JA/01/2018

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan arah kebijakan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. tujuan; dan
 3. sistematika;

- b. Bab II Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum dalam Pembangunan Nasional, terdiri atas:
 - 1. tema;
 - 2. strategi pembangunan; dan
 - 3. prioritas pembangunan nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional;
- c. Bab III Arah Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, terdiri atas:
 - 1. tema pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018;
 - 2. sasaran pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018;
 - 3. arah kebijakan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018; dan
 - 4. rekomendasi hasil rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017;
- d. Bab IV Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, yang memuat 8 (delapan) program, yaitu:
 - 1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. program pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan;
 - 6. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum;

7. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan perkara tindak pidana korupsi; dan
 8. program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara; dan
- e. Bab V Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana tercantum dalam formulir Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu:
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;

- b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - d. Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Bidang masing-masing; dan
 - f. para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada Jaksa Agung.
- (4) Akhir periode pelaporan yaitu sebagai berikut:
- a. laporan bulanan yaitu tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. laporan triwulan pertama yaitu tanggal 31 Maret;
 - c. laporan triwulan kedua yaitu tanggal 30 Juni;
 - d. laporan triwulan ketiga yaitu 30 September; dan
 - e. laporan triwulan keempat yaitu tanggal 31 Desember.
- (5) Selain laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.

Pasal 5

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-001/A/JA/01/2018
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan (Anggaran Berbasis Kinerja/ABK) dan (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 maka Kejaksaan RI menyusun Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2018 untuk melanjutkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-007/A/JA/08/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2015-2019) yang mengacu kepada (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2018 merupakan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan perencanaan kinerja dan anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

untuk mewujudkan Visi Misi dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengimplementasian dokumen RKP tahun 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 memakai prinsip *money follow program* menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik), integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi), pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar bidang pada Kejaksaan RI (Bidang Intel, Pembinaan, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat) untuk tingkat Pusat/ Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (daerah) dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan).

Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 merupakan amanat dari pelaksanaan RKP/RKT tahun 2018 yakni pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba, kerangka kelembagaan dan regulasi, serta norma-norma pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 yang menggunakan prinsip *money follows program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum Kejaksaan Agung RI) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2018 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen

perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung RI, sasaran Program untuk tingkat eselon I, sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat eselon II dan III maupun komponen dan sub komponennya.

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan serta Rencana Strategis Kejaksaan 2015-2019. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI dalam pembangunan terutama bidang hukum.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI ini, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 2018 yang menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan **money follow program** dengan cara hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian program prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, dalam Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2018 yang merupakan program prioritas berkelanjutan dari Rencana Kerja Kejaksan RI tahun sebelumnya (tahun anggaran 2017) adalah penanganan perkara tindak pidana, baik perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus, sehingga tugas dan fungsi ini yang harus mendapatkan prioritas dalam

penganggarannya. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah mengingat keterbatasan pendapatan negara dari sektor pajak dan juga pendapatan negara bukan pajak apabila dibandingkan dengan kewajiban pemerintah untuk membiayai seluruh belanja Kementerian/Lembaga dan juga kewajiban pembayaran hutang negara yang cukup tinggi. Oleh karena itu dalam Tahun Anggaran 2018, tidak semua tugas dan fungsi Kejaksaan dibiayai secara merata.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 memuat program prioritas Kejaksaan dan kerangka pendanaannya.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 mempunyai tujuan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung RI, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaan secara profesional, proporsional dan akuntabel.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan prinsip money follow program yang di sinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan anggaran Tahunan Tahun 2018.

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat tentang Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.
- BAB III : TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2017.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2018, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 8 (delapan) program Kejaksaan RI yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan, Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
- BAB V : PENUTUP

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TEMA

Pada penyusunan RKP tahun 2018, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang semula 23 Prioritas Nasional/PN dan 88 Program Prioritas/PP pada RKP 2017 menjadi 10 Prioritas Nasional/PN dan 30 Program Prioritas/PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah (satker lainnya) dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RKP 2018 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan PP No. 17/2017 tentang sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP tahun 2018 menjabarkan lebih rinci PN kedalam PP dan Kegiatan Prioritas/KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen Perencanaan dan Penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) DAN NAWACITA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar meliputi :

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“.

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) **MISI PEMBANGUNAN** yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 tersebut disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

2. TEMA PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 disusun dengan tema : **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Tema ini merupakan tindak lanjut dan perampingan dari Tema RKP tahun 2017 dengan maksud / tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 ke RKP tahun 2018, sehingga Prioritas Nasional/PN, Program Prioritas/PP dan Kegiatan Prioritas/KP masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi Pembangunan dalam RKP 2018 sebagaimana diamanatkan konstitusi yang menegaskan bahwa anggaran Negara dan daerah adalah instrument untuk mencapai tujuan Nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik Perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*) dan bukan dikendalikan oleh ketersediaan anggaran lagi (*budget-driven*) atau karena tugas dan fungsi organisasi (Tusi). Teknis dalam mensinergitaskan antara kerangka perencanaan, kerangka penganggaran dengan kerangka regulasi dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta) dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam penyusunan RKP 2018, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, *holistic, integrative, spasial*, yaitu dirumuskan dalam : (1). Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja, (2). Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu dan (3). Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan. Norma Pembangunan Kabinet Kerja adalah :

1. Pembangunan bersifat tematik yakni tema tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2018 dilaksanakan pada 10 Prioritas Nasional.
2. Holistik yakni penjabaran dari program Presiden yang komprehensif mulai dari hulu sampai hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.
3. Integratif yakni upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan.
4. Spasial yakni kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah dengan memperhatikan pada keterpaduan perencanaan dan penganggaran.
5. Pengendalian kerangka perencanaan, kerangka penganggaran dan kerangka kelembagaan serta kerangka regulasi.
6. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan.
7. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Pemerintah juga memfokuskan pada 3 Dimensi Pembangunan yaitu :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang dijabarkan dalam :
 - a. Revolusi Mental (Nawacita ke 8 & 9);
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Perumahan.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang dijabarkan dalam :
 - a. Kedaulatan Pangan;
 - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Kemaritiman dan Kelautan;
 - d. Pariwisata dan Industri (a, b, c, d merupakan Nawacita ke 6 & 7).
3. Dimensi Pemerintahan dan Kewilayahan, yang dijabarkan dalam :
 - a. Antar Kelompok Pendapatan;
 - b. Antar Wilayah : (1). Desa ; (2). Pinggiran ; (3). Luar jawa ; (4). Kawasan timur;

(a dan b merupakan Nawacita ke 3).

Di samping itu Pemerintah juga menyampaikan Kondisi Perlu yaitu :

1. Kepastian dan Penegakan Hukum (Nawacita ke 4);
2. Keamanan dan Ketertiban (Nawacita ke 1);
3. Politik dan Demokrasi (Nawacita ke 9);
4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi (Nawacita ke 2).

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (PN), PROGRAM PRIORITAS (PP) DAN KEGIATAN PRIORITAS (KP) PEMBANGUNAN NASIONAL

Untuk mendukung Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Prioritas difokuskan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan, melalui :

1. Penguatan Pertahanan;
2. Stabilitas Politik dan Keamanan;
3. Kepastian Hukum dan;
4. Reformasi Birokrasi.

PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM.

Program Prioritas Kepastian Hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

- a. penegakan hukum yang berkualitas;
- b. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
- c. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

Pada TA 2018 terdapat 3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas pada Program Prioritas Kepastian Hukum, dengan dasar penetapan yang terdiri dari :

1. peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum;
2. optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi;

3. menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilakukan melalui:

- a. perluasan implementasi e-Government yang terintegrasi;
- b. penguatan implementasi standar pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan;
- c. penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur; dan
- d. peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Arah Kebijakan Prioritas Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2018 adalah Kepastian Hukum, yang meliputi :

1. PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Kegiatan Prioritas Penegakan Hukum Yang Berkualitas, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, dilaksanakan dengan Sasaran Kegiatan yaitu meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum, yang dilakukan untuk mencapai Sasaran berupa :

- a. Terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas;
- b. Terbangunnya Sistem Penanganan Perkara terpadu berbasis teknologi informasi;
- c. Terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi;
- d. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan terpadu untuk sistem peradilan anak;
- e. Terlaksananya penanganan perkara sumber daya alam yang berkualitas.

2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG EFEKTIF

Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif, dilaksanakan dengan Sarasan Kegiatan yaitu Optimalisasi

pengecehan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan dilakukan untuk mencapai Sasaran berupa :

- a. Terlaksanakannya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.

3. PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN

Kegiatan Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan yaitu Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Hak atas Keadilan, yang dilakukan untuk mencapai Sasaran berupa :

- a. Terbangunnya Sistem Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terpadu;
- b. Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal.

PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Untuk Program Prioritas Reformasi Birokrasi, pada TA 2018 terdapat 4 (empat) kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yaitu :

1. Efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien;
4. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Reformasi Birokrasi , yaitu :

1. Perluasan Implementasi *E-Government* yang terintegrasi, dengan sasaran :

- a. Diterapkannya aplikasi *e-gov* berbagi pakai (*e-Office, e-planning, e-budgeting, e-performance, e-management* kepegawaian, e-pengaduan) di K/L/D;
 - b. Diterapkannya e-arsip di 142 K/L;
 - c. Terintegrasinya Sistem *Monev-Next Generation online* PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN);
 - d. Diterapkannya pelayanan publik *online* di 500 Unit Pelayanan Publik dan
 - e. Diterapkannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
2. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan, dengan sasaran :
- a. Diterapkannya standar pelayanan publik di 300 unit pelayanan publik;
 - b. Meningkatnya kapasitas aparatur pelayanan publik pada masing-masing unit pelayanan publik;
 - c. Terselekkannya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat;
 - d. Beroperasinya mailo pelayanan publik yang terintegrasi.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur, dengan sasaran :
- a. Terlaksananya penataan kelembagaan LPNK dan LNS;
 - b. Terbentuknya Agen Perubahan RB di K/L/Pemda;
 - c. Tersusunnya Grand Design Public Administration;
 - d. Terlaksananya pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan sistem merit ASN;
 - e. Meningkatnya kapasitas ASN termasuk terpenuhinya pengembangan kapasitas ASN minimum 20 jam/tahun;
 - f. Terlaksananya inovasi dalam kebijakan publik;
 - g. Meningkatnya nilai indeks RB instansi Pemerintah;
 - h. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah;

- i. Tersusunnya kebijakan redistribusi ASN dan
 - j. Tersusunnya kebijakan penetapan standarisasi kompetensi jabatan.
4. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan sasaran :
- a. Pengawasan intern Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - b. Peningkatan kapabilitas APIP da Maturitas SPIP menuju level 3;
 - c. Perluasan cakupan produk dalam *e-catalogue*;
 - d. Meningkatnya kapasitas dan standarisasi LPSE;
 - e. Meningkatnya disiplin dan integritas SDM aparatur negara di seluruh K/L/D.

INDIKATOR DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS (PP)

Program Prioritas Kepastian Hukum, untuk Kejaksaan RI dilaksanakan dengan indikator dan sasaran kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator	Sasaran
I.	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
	1. Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan dan Penuntutan	Terpenuhinya biaya penanganan perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan, untuk di Kejagung , Kejati, Kejari dan Cabjari seluruh Indonesia.
	2. Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI)	- Terlaksananya Penerapan Aplikasi <i>Case Manageent System</i> (CMS) dalam rangka mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI). - Tersedianya Perangkat untuk mendukung Penerapan Sistem

No.	Indikator	Sasaran
		Informasi Tilang Kejaksan Terintegrasi di Kejagung, Kejati dan Kejari.
	3. Peningkatan Kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA	- Terlaksananya Diklat terpadu penanganan perkara ABH bagi Jaksa.
	4. Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam	- Terlaksananya Diklat Illegal Fishing dan Mineral Batubara bagi Jaksa.
II	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	
	1. Kolaborasi Pencegahan Korupsi	Terlaksananya Kegiatan Jaringan Masyarakat Anti KKN dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di Kejagung, Kejati, Kejari maupun Cabjari
	2. Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat.	Terlaksananya kegiatan Pemulihan Aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
III	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan	
	1. Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap	- Tersedianya ruang diversifikasi di Kejari

No.	Indikator	Sasaran
	Perempuan dan Anak	

Dalam Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) akan dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) Kejati yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DIY, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT dan Papua, serta 88 (delapan puluh delapan) Kejari di 22 (dua puluh dua) Kejati tersebut di atas. Penerapan sistem ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan integrasi penanganan perkara (khususnya perkara pidana umum). Selain kebutuhan sarana prasarana yang mendukung upaya integrasi SPPT-TI, pengembangan SDM pendukung juga diperkuat, sehingga operasional sistem juga dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adapun Kegiatan Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 direncanakan akan dilaksanakan dengan Target sebagai berikut :

1. Kegiatan Prioritas : Penegakan Hukum Yang Berkualitas

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	- Pengadaan Aplikasi Case Management System (CMS) dalam rangka	- Tersedianya dan terlaksananya Aplikasi Case	Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan	22 (dua puluh dua) Kejati dan 88

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Lainnya	<p>mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI).</p> <p>- Pengadaan Perangkat untuk mendukung Penerapan Sistem Informasi Tilang Kejaksaan Terintegrasi di Kejagung, Kejati dan Kejari.</p>	<p>Management System (CMS) dalam rangka mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI).</p> <p>- Tersedianya dan terlaksananya Sistem Informasi Tilang di Kejagung, Kejati dan Kejari.</p>	<p>Perkara (SPPT-TI)</p> <p>Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara Tilang</p>	<p>(delapan puluh delapan) Kejari.</p> <p>Kejagung, 31 Kejati, 10 Kejari Kota Besar, 69 Kejari Tipe A dan 336 Kejari Tipe B</p>
2	Program Pendidikan dan Pelatihan	- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terpadu	- Terlaksananya Diklat terpadu penanganan perkara ABH	Peningkatan Kapasitas SDM Jaksa yang	3 (tiga) angkatan @ 30 (tiga puluh)

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Aparatur Kejaksaan	penanganan perkara ABH bagi Jaksa. - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan penanganan perkara Illegal Fishing dan Mineral Batubara bagi Jaksa.	bagi Jaksa. - Terlaksananya Diklat di Bidang Sumber Daya Alam .	berkompeten dalam penanganan perkara ABH. - Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam .	orang Jaksa. 3 (tiga) angkatan @ 30 (tiga puluh) orang Jaksa.
3	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	- Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	- Terpenuhinya Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	667 perkara tahap pra penuntutan dan 450 perkara tahap penuntutan di Kejagung, 7.190 perkara

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
					di Kejati, 559 perkara illegal fishing, 79.789 perkara di Kejari da Cabjari.

**2. Kegiatan Prioritas : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
yang Efektif yang Efektif**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSB UD Hukum dan Hankam	Kegiatan Jaringan Masyarakat Anti KKN dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di Kejagung, Kejati, Kejari maupun	Tercapainya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Daerah.	Kolaborasi Pencegahan Korupsi, melalui kegiatan TP4P dan TP4D.	20 Kegiatan TP4P di Kejagung, 310 kegiatan TP4D di Kejati, 2.518 kegiatan TP4D di Kejari dan 126

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
		Cabjari			kegiatan TP4D di Cabjari
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.	Terlakannya Pembinaan tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat	Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat.	4 kegiatan PPA di luar negeri dan 42 kegiatan PPA di dalam negeri.

3. Kegiatan Prioritas : Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Pembangunan ruang diversi di Kejari seluruh Indonesia.	Tersedianya ruang diversi di Kejari seluruh Indonesia	Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	145 Kejari

Dengan demikian, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas Kejaksaan yang menjadi Program Prioritas Nasional, yang harus dilaksanakan pada tahun 2018.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018

A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yaitu **“MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN”**, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tema yang ditentukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 tersebut mempunyai maksud agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang disusun dengan tema *Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antara Wilayah*.

Apabila diperhatikan, tema ini sepertinya tidak menyentuh pada aspek penegakan hukum, namun demikian investasi dan pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan sukses, apabila negara dalam keadaan tidak aman, oleh karena itu diperlukan pula adanya kondisi negara yang aman dari gangguan kriminalitas, menurunnya angka tindak pidana korupsi, tercapainya dengan optimal pengembalian kerugian negara serta adanya jaminan kepastian hukum terhadap semua jenis pelanggaran hukum di Indonesia.

Dengan adanya kepastian hukum yang kondusif di Indonesia, akan meningkatkan kepercayaan para pelaku bisnis baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor perekonomian di Indonesia, sehingga otomatis akan membuka lapangan kerja dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, kepercayaan para investor akan meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ini pun, diperlukan peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, disamping itu perlu juga adanya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, sehingga jangan sampai terjadi gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 disusun dengan tema **“MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR KEJAKSAAN RI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM YANG BENAR DAN BERKUALITAS“**

Tema ini sejalan dengan Visi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yaitu **“MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”**.

Tema dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tersebut mengandung makna bahwa :

- a. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana : melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan

penyidik, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, melakukan upaya antara lain :

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengawasan peredaran barang cetakan;
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

- b. **Profesional** : segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- c. **Proporsional** : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. **Akuntabel** : kinerja aparaturnya Kejaksaan RI memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengambil tema tersebut diatas, diharapkan pada tahun 2018, aparat Kejaksaan RI dalam melaksanakan penegakan hukum, dapat meningkatkan profesionalitasnya, dan menghasilkan kinerja yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat

diakses langsung oleh masyarakat, dan memiliki kepastian hukum, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan diatas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode 2015-2019 yaitu :

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara;
2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan;
3. Meningkatnya kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa Hukum Perdata dan tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kejaksaan RI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan RI untuk periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata;
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum;
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum;
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018 yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara dengan baik dan benar, melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja aparat Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum;
3. Meningkatnya kinerja aparat Kejaksaan RI melalui pembangunan teknologi informasi;
4. Mengoptimalkan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;

5. Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 3 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan.

Sasaran penegakan dan kesadaran hukum pada RPJMN 2015-2019 selaras dengan ruang lingkup reformasi hukum yang menitikberatkan pada pembenahan Lembaga/aparat penegak hukum, penataan regulasi dan pembangunan budaya hukum. Dalam paket reformasi (revitalisasi) hukum, terdapat beberapa peran penting Kejaksaan RI, yaitu:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D);
2. Pembenahan manajemen perkara melalui integrasi database penanganan perkara, tata kelola benda sitaan dan barang rampasan; serta pendampingan Jaksa pada penyidikan;
3. Penguatan SDM melalui rekrutmen dan promosi berbasis kinerja di Kejaksaan RI; dan
4. Penguatan kelembagaan dengan melakukan reorganisasi Lembaga Kejaksaan RI berdasarkan fungsi serta penguatan Komisi Kejaksaan RI.

Peran penting Kejaksaan RI tersebut diharapkan akan memberikan rasa aman bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya baik di pusat dan daerah.

Pada RKP 2018, melalui Program Prioritas “Kepastian Hukum”, Kejaksaan RI diarahkan untuk berkontribusi pada 3 (tiga) kegiatan dan proyek-proyek prioritas nasional, yaitu :

1. Dalam rangka meningkatkan “penegakan hukum yang berkualitas”, Kejaksaan RI diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan biaya penanganan perkara tindak pidana umum di tahap pra penuntutan dan penuntutan secara optimal; pelaksanaan pilot project SPPT-TI di 5 (lima) daerah bersama dengan komponen aparat penegak hukum lainnya; pelaksanaan peningkatan kapasitas Jaksa dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); serta penegakan hukum di bidang Sumber Daya Alam;
2. Terkait dengan “pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif”, Kejaksaan RI diarahkan untuk melakukan pembenahan tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi di tingkat pusat, bersinergi dengan KPK dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan); dan berperan dalam berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS);
3. Terkait dengan “penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan”, Kejaksaan RI bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, diarahkan untuk mendorong penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu – Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan penguatan peran Jaksa dalam pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan (Diversi) pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada perencanaan dan penganggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran (TA) 2018 target dan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan proyek prioritas yang telah teralokasikan, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) berbasis Teknologi Informasi (TI), yaitu :

1. Target SPPT-TI tahun 2017, dengan sasaran pertukaran data, belum tercapai karena belum ada standar data yang akan dipertukarkan;
2. Kejaksaan RI perlu menindaklanjuti keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola sistem informasi penanganan perkara di Kejaksaan yang ada pada saat ini serta sistem informasi penanganan perkara di Kejaksaan RI yang ada saat ini (SIMKARI);
3. Pada tahun 2018, implementasi dari sistem informasi penanganan perkara melalui *Case Management System* (CMS) agar lebih dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Kejaksaan RI sebagai bagian dari lembaga Pemerintah yang memegang posisi sentral dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum, selalu menjadi bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebagai contoh, dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan implementasi dari UNCAC, Kejaksaan menjadi salah satu Kementerian/Lembaga prioritas dalam pelaksanaan Aksi tiap tahunnya. Dimulai dari Inpres No. 9 Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun 2011, Inpres No. 1 Tahun 2013, Inpres No. 2 Tahun 2014, Inpres No. 7 Tahun 2015, hingga Inpres No. 10 Tahun 2017.

Dukungan Kejaksaan RI untuk pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2017 meliputi:

1. Implementasi hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pelaksanaan eksekusi uang pengganti dan penjara pengganti;
2. Optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Nilai Denda dalam KUHP;
3. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana korupsi;
4. Dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);

5. Optimalisasi Whistleblowing System (WBS); dan
6. Penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Keberlanjutan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus didorong, salah satunya melalui pelaksanaan RKP 2018 melalui beberapa proyek prioritas nasional yang telah diakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

C. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2017

Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2017 di Badan Diklat Kejaksaan RI, dengan tema “**Meneguhkan Komitmen Penegakan Hukum Kejaksaan yang Baik, Benar dan Terpercaya Demi Sukses Pembangunan Nasional**”. Tema dimaksud secara teoritik maupun empirik hendak menegaskan bahwa ada korelasi strategis antara penegakan hukum Kejaksaan di satu sisi dengan suksesnya pembangunan nasional pada sisi yang lainnya.

Meneguhkan komitmen penegakan hukum Kejaksaan yang baik, benar dan terpercaya adalah proses menuju komitmen korps Adhyaksa untuk melakukan tugas penegakan hukum kejaksaan yang baik, benar dan terpercaya dalam tataran realitas. Penegakan hukum yang baik dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang beretika menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesusilaan, penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang berdasarkan hukum dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sedangkan penegakan hukum yang terpercaya merupakan penegakan hukum yang akuntabel, dapat diukur dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat dimana hukum itu tumbuh dan diterapkan. Penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya pastilah merupakan penegakan hukum yang mendorong suksesnya pembangunan nasional. Itulah makna penegakan hukum yang dikehendaki dalam tema Raker tahun 2017 ini, dan janganlah salah memaknainya dengan makna bahwa

penegakan hukum yang tidak baik, tidak benar dan tidak terpercaya diperbolehkan asalkan karena alasan semata-mata demi suksesnya pembangunan pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa implementasi penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya bukanlah perkara mudah dan sederhana. Apalagi dalam kompleksitas permasalahan penegakan hukum dewasa ini, antara lain terkait masalah disparitas kewenangan antar penegak hukum, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum, kesejahteraan penegak hukum, kultur dan kesadaran hukum masyarakat, pada kenyataannya menambah rumit mewujudkan konsep-konsep penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya.

Adapun Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

I. BIDANG PEMBINAAN :

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Seluruh pimpinan satuan kerja harus mengambil langkah-langkah pengelolaan keuangan, dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah serta adanya sistem pengendalian intern secara efektif berdasarkan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.	1. JAMBIN : Kepala Biro Keuangan 2. JAMWAS : - Inspektur Keuangan, - Kepala Kejaksaan Tinggi, - Kepala Kejaksaan Negeri Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan
2.	Setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim RB Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, melaksanakan kegiatan RB berpedoman <i>Road Map</i> RB 2015-2019 serta melaporkan hasil kegiatan RB kepada Tim RB Kejaksaan Agung setiap Triwulan.	1. JAMBIN : - Kepala Biro Perencanaan, - Kepala Kejaksaan Tinggi - Kepala Kejaksaan Negeri 2. JAMWAS Waktu Pelaksanaan 6 (enam)

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
		Bulan
3.	Optimalisasi dan penyempurnaan dalam penyajian database kepegawaian, hukuman disiplin/pengawasan dan diklat melalui sarana teknologi informasi.	1. JAMBIN : - Kepala Biro - Kepegawaian - Kepala Pusdaskrimti 2. JAMWAS 3. KABANDIKLAT Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan
4.	Diperlukan langkah koordinasi internal dan eksternal dan upaya bersama secara strategis dan komprehensif untuk mewujudkan keberadaan <i>Central Authority</i> dibawah Kejaksaan R.I.	1. JAMBIN : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri 2. JAM INTEL 3. JAM PIDSUS Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan

II. BIDANG INTELIJEN :

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
	STRATEGI KONSOLIDASI	
1.	Melakukan sosialisasi tentang perubahan organisasi dan tata kerja bidang intelijen sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sekaligus memberikan pemahaman mengenai 77 (tujuh puluh tujuh) sektor masalah yang menjadi tugas bidang intelijen, dalam rangka pembentukan paradigma (<i>mindset</i>)	Semua Direktorat

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
	dan budaya kerja SDM intelijen Kejaksaan.	
2.	Menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung RI tentang Administrasi Intelijen, dan SOP (<i>Standar Operating Procedures</i>) di lingkungan bidang intelijen Kejaksaan.	Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktorat, dan Pusat Penerangan Hukum
3.	Menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung RI tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi antara Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI terkait dengan Direktorat D (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan.	Direktorat I / Direktorat D
	STRATEGI OPTIMALISASI	
4.	Membentuk Adhyaksa Command Centre dan Hotline Siaga Adhyaksa di Kejaksaan seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan penyediaan dan pendistribusian produk intelijen sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan cegah dini.	Direktorat III/Direktorat E, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
5.	Menyusun <i>database</i> Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan dan melaksanakan “Program Tabur 31.1”	Direktorat III/Direktorat E, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
	(Tangkap Buronan Tigasatu Satu) pencarian buronan Kejaksaan, yaitu 31 (tiga puluh satu) Kejaksaan Tinggi melakukan penangkapan minimal 1 (satu) orang buronan Kejaksaan dalam triwulan pertama tahun 2018 guna mewujudkan <i>zero</i> tunggakan eksekusi badan dalam perkara tindak pidana.	Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan Kejaksaan RI Di Luar Negeri
6.	Menyusun kembali Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Bank Data Intelijen berbasis teknologi “Big Data” sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-25/A/JA/06/2009 tanggal 22 Juni 2009 guna memenuhi kebutuhan intelijen Kejaksaan menuju Intelijen Generasi Ketiga/Intelijen Era Digital.	Direktorat III / Direktorat E,
	STRATEGI PEMULIHAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (<i>PUBLIC TRUST</i>)	
7.	Memasukkan program “ Jaksa Menyapa ” dalam kegiatan bidang intelijen Kejaksaan dan mengefektifkan kanal media sosial agar dapat menjangkau masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mengaktifkan masyarakat untuk berperan serta mendukung kebijakan penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.	Puspenkum, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri

III. BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	a. Implementasi penegakan hukum progresif dalam penanganan perkara pidum	
	<ul style="list-style-type: none"> • membuat surat edaran JAM Pidum tentang implementasi penegakan hukum progresif dalam penanganan perkara pidum • menyempurnakan pedoman penuntutan dengan memperhatikan tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dengan memperhatikan perkembangan masyarakat. 	JAM PIDUM
	b. Mengedepankan Pidana Denda dan/atau Uang Pengganti (pendekatan keadilan restoratif)	
	<ul style="list-style-type: none"> • membuat Surat Edaran JAM Pidum tentang Tindak Pidana yang dapat diterapkan Pidana Denda sebagai alternatif Pidana Badan 	JAM PIDUM
2.	Tim Internal merumuskan kebijakan terkait pembentukan Satgas Siber di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • JAM PIDUM • Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan sistem <i>at cost</i> dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan <i>accrual basis system</i> • Penyusunan anggaran penanganan perkara pidum dengan memperhatikan kebutuhan riil sesuai dengan daerah masing-masing dalam bentuk program 	<ul style="list-style-type: none"> • JAM Pidum • Kepala Kejaksaan Tinggi • Kepala Kejaksaan Negeri • Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

IV. BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Perlu diterbitkan Juknis Jampidsus tentang pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan parameter perkara besar (<i>big fish</i>), kualitas dan konsistensi pelaksanaan serta prioritas pada 10 area rawan korupsi.	Para Direktur
2.	Menyusun Petunjuk Teknis Jampidsus tentang Kualitas pra penuntutan dan Penuntutan.	Direktur Penuntutan
3.	Membentuk TIM untuk melakukan koordinasi dengan Bidang Pengawasan terkait penanganan perkara Saber Pungli.	Direktur Penuntutan
4.	Menyusun Petunjuk Teknis Jampidsus tentang Peningkatan Kualitas dan Strategi Pelaksanaan Eksekusi.	Direktur Eksekusi dan Eksaminasi
5.	Perlu disusun <i>blue print</i> Satgassus P3TPK dari masing-masing Direktur dan Menyusun Surat Edaran Jampidsus tentang Tolok Ukur Penilaian Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.	Sesjampidsus dan Para Direktur
6.	Membentuk Tim bekerjasama dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) untuk mendorong Mahkamah Agung RI segera membentuk PN TIPIKOR di setiap Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan 3 UU 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor	Direktur Penuntutan
7.	Membentuk Tim yang bertugas untuk mendorong bidang Intelijen dan Puslitbang Kejaksaan RI menyusun standar penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.	Sesjampidsus

V. BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
a.	1. Membuat Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Fungsi Penegakan Hukum. 2. Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Kejaksaan. 3. Juklak/Juknis pekerjaan kegiatan fungsi DATUN yang dapat dianggarkan.	JAMDATUN KAJATI KAJARI
b.	1. Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta SE 010/G/Gs.2/07/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada seluruh jajaran Bidang DATUN.	JAM DATUN KAJATI KAJARI
	2. Dalam menerbitkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah potensi timbulnya kerugian negara dan menjaga kewibawaan Pemerintah.	
c.	1. Sosialisasi tentang fungsi DATUN terkait dengan permasalahan Perikatan/Perjanjian kepada Negara/Pemerintah dan BUMN/ BUMD.	JAMDATUN KABANDIKLAT KAJATI KAJARI

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
	2. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing dan hukum internasional bagi JPN melalui Pendidikan dan pelatihan, <i>Focus Group Discussion</i> , <i>In House Training</i> dan <i>Workshop</i> maupun cara lainnya.	
d.	Perlu adanya Juklak dan Juknis bersama (Bidang Intel, DATUN, dan Pidsus).	JAM INTEL JAM DATUN JAM PIDSUS
e.	1. Perlu memaksimalkan koordinasi di lingkungan internal Kejaksaan maupun eksternal (Kementerian Keuangan dan BPK RI). 2. Perlu memvalidasi ulang data tunggakan PUP yang akan dimohonkan untuk diajukan penghapusannya.	JAM DATUN BIRO KEUANGAN KAJATI KAJARI
f.	1. Membuat surat edaran ke daerah bahwa tugas dan fungsi Datun tidak hanya terbatas pada kegiatan yang didasarkan pada adanya Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur oleh Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan tetapi juga adanya	JAM DATUN
	kegiatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 34 UU Kejaksaan yang pelaksanaannya tidak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). 2. Meningkatkan koordinasi Bidang DATUN dengan Bagian Keuangan baik di tingkat Pusat maupun Daerah terkait mekanisme kebutuhan dan pertanggung-jawaban anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Datun	

VI. BIDANG PENGAWASAN :

NO	RENCANA AKSI	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Optimalisasi Penyelesaian Laporan Pengaduan	- Disusun parameter tentang Zero Tunggakan Lapdu.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		- Dilakukan inventarisasi dan evaluasi tunggakan Lapdu.	SESJAMWAS/ INSPEKTUR/ ASWAS
2.	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Optimalisasi Peran Pengawasan Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	a. Implementasi SPIP	
		- Perlu disusun pedoman teknis penerapan SPIP di Kejaksaan dan diinternalisasikan di seluruh satuan kerja Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		- Segera dibentuk Tim untuk mengkoordinasikan penerapan SPIP di Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		b. Optimalisasi Peran Pengawasan Selaku APIP	
		- Segera disusun pedoman teknis pelaksanaan tugas APIP di lingkungan Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		- Agar para Fungsional Auditor dan Calon Auditor yang ada ditempatkan di Bidang Pengawasan serta dilibatkan dalam kegiatan Pengawasan Fungsional dan APIP.	JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS/ KAJATI

NO	RENCANA AKSI	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
		<p>- Perlu dikoordinasikan dengan Bidang Pembinaan dan Badan Diklat Kejaksaan R.I. untuk dilaksanakan Diklat Auditor dengan kurikulum menyangkut kompetensi dasar Auditor.</p>	<p>JAMWAS/ JAMBIN/ KABADIKLAT/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR/</p>
		<p>- Segera disusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Inspektorat Keuangan.</p>	<p>JAMWAS/ JAMBIN/ KABADIKLAT/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR</p>
3.	Pembangunan Sistem Teknologi Informasi Pengawasan	Dibentuk Tim Pembangunan Sistem Teknologi Informasi Pengawasan.	JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS
4.	Pembangunan Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Bebas Korupsi	<p>a. <i>Whistle blowing System</i> (WBS)</p> <p>- Kebijakan WBS diinternalisasikan kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan.</p> <p>- Segera disusun KEPJA tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor, dan dibuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas UPP.</p> <p>b. Unit Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Draf PERJA tentang Unit Pengendalian Gratifikasi segera diajukan kepada</p>	<p>JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR/ KAJATI/ ASWAS</p> <p>JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR</p> <p>JAMWAS/ JAMBIN/</p>

NO	RENCANA AKSI	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
		Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.	SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		c. Benturan Kepentingan	
		Segera disusun PERJA tentang Penanganan Benturan Kepentingan.	JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		d. Pembangunan Satuan Kerja Percontohan (<i>pilot project</i>) Sebagai Zona Integritas	
		Dibentuk Tim Pelaksana Penilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM/Penilaian Sidhakarya Tahun 2018.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		e. Sapu Bersih Pungutan Liar	
		Perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Tim Saber Pungli Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		f. Perlu dibuat PO BOX Pengaduan Masyarakat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ KAJATI

VII. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mengintensifkan koordinasi Badiklat dengan pihak ketiga untuk kerjasama	Badiklat JAM Pembinaan

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
	dan mengalokasikan anggarannya.	
2.	Perlu dilakukan kajian/analisa kebutuhan pembentukan Sekolah Tinggi Ilmu Kejaksaan.	Badiklat JAM Pembinaan
3.	Perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung mengenai standarisasi tenaga pengajar.	Badiklat JAM Pembinaan
4.	Perlu dilakukan sinergitas antara Badan Diklat dengan bidang Pembinaan (inventarisasi pegawai Kejaksaan lulusan doktoral (S3) yang dapat diproyeksikan untuk tenaga pengajar).	Badiklat JAM Pembinaan
5.	Mengoptimalkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan Penyusunan Kurikulum Bahan Ajar untuk setiap program diklat.	Badiklat JAM Pembinaan Bidang-bidang Terkait
6.	Membuat pedoman teknis pelaksanaan diklat berbasis kompetensi.	Badiklat JAM Pembinaan Bidang-bidang Terkait
7.	Mengoptimalkan SDM dan sistem manajemen Badiklat yang berbasis IT.	Badiklat JAM Pembinaan

BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

ANGGARAN KEJAKSAAN RI PADA TAHUN ANGGARAN 2018

I. PAGU INDIKATIF 2018

Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : S-398/MK.02/2017 dan S-193/M.PPN/D.8/KU 01.01/05/2017 tanggal 09 Mei 2017, perihal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, dalam Lampiran IIIa, Kejaksaan RI memperoleh Pagu Indikatif sebesar Rp. 4.454.565.971.000,- (empat triliun empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan perincian per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.558.503.798.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	130.128.049.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	24.821.134.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	98.259.268.000
5	Program Penyelidikan/Pengamana/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	84.212.135.000
6	Program Penanganan dan Penyelesaian	343.498.559.000

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
	Perkara Pidana Umum	
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	200.240.499.000
8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	14.902.529.000
	JUMLAH	4.454.565.971.000

II. PAGU ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor :S-593/MK.02/02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/75/2017 tanggal 25 Juli 2017, Pagu Anggaran Kejaksaan TA 2018 adalah sebesar Rp. 5.486.605.675.000,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 1.032.039.704.000,- (satu triliun tiga puluh dua miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dari Pagu Indikatif, dengan perincian per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.713.368.943.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	559.655.789.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	25.679.551.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	98.259.268.000

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
	Kejaksaan RI	
5	Program Penyelidikan/Pengamana/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	124.390.555.000
6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	642.395.809.000
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	300.388.029.000
8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	22.467.731.000
	JUMLAH	5.486.605.675.000

III. PAGU ALOKASI ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor :S-162/MK.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2018 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belnja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI Dalam Rangka Pembiacraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN TA 2018,maka Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2018 memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah), sehingga Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan TA 2018 menjadi sebesar Rp. 6.386.605.675.000,- (enam triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian per program menjadi sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.758.207.918.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.414.816.814.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	25.679.551.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	98.259.268.000
5	Program Penyelidikan/Pengamana/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	124.390.555.000
6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	642.395.809.000
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	300.388.029.000
8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	22.467.731.000
	JUMLAH	6.386.605.675.000

Selanjutnya telah disusun Program Kerja dan Anggaran Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Alokasi Anggaran yang tersedia untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar Rp. 3.758.207.918.000,- (tiga triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dibandingkan dengan program-program lain, karena seluruh belanja pegawai (kecuali Badan Diklat) dan biaya operasional (pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, honor pramubakti, perjalanan dinas, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran) termasuk di dalamnya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.855.613.100.000,- (dua triliun delapan ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) termasuk untuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI;
- b. Belanja barang operasional untuk kebutuhan Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp. 709.104.813.000,- (tujuh ratus sembilan miliar seratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) antara lain untuk pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya dan jasa, honorarium pramubakti dan satpam, honorarium pengelola keuangan, perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran;
- c. Belanja Barang Non Operasional untuk kebutuhan 8 (delapan) Satker baru dan 1 (satu) Satker peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri;
- d. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama Hukum serta biaya operasional perwakilan Kejaksaan di KJRI Hongkong, Bangkok, dan Jeddah;
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Satker Pusat dan Daerah;
- f. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI;
- g. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, pengolahan Data serta Pemantauan dan Evaluasi;

- h. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI untuk melayani kebutuhan perlengkapan perkantoran untuk Satker Kejaksaan Agung RI;
- i. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai, antara lain untuk pemeliharaan Satker Kejaksaan Agung RI;
- j. Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dengan kegiatan antara lain Implementasi Aplikasi *Case Management System* (CMS) untuk mendukung *Pilot Project* SPPT berbasis TI yang akan dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) Kejaksaan Tinggi, dengan anggaran sebesar Rp. 39.903.200.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- k. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;
- l. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- m. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait dengan hasil kejahatan;
- n. Perangkat Pendukung penerapan Sistem Informasi Bukti Pelanggaran Lau Lintas (tilang) Kejaksaan RI terintegrasi dengan Kepolisian dan Pengadilan sebesar Rp. 39.838.975.000,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o. Biaya konsultan untuk Optimalisasi Tata Laksana dan Proses Kerja serta Pengembangan *Standrad Operating Prosedure* sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan

Alokasi Anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan adalah sebesar Rp. 1.414.816.814.000,- (satu triliun empat ratus empat belas miliar

delapan ratus enam belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018 yaitu :

- a. Pengadaan Komputer, printer, laptop, AC, meubelair, kendaraan roda 2, mobil ambulance, alat kesehatan poliklinik Kejaksaan Agung, alat *fire hydrant* untuk Satker Kejaksaan Agung;
- b. Pembangunan gedung arsip pada Badan Diklat Kejaksaan RI di Ceger;
- c. Rehabilitasi/renovasi/perluasan gedung kantor untuk 131 (seratus tiga puluh satu) Satker di daerah;
- d. Pengadaan genset untuk 81 (delapan puluh satu) Satker daerah;
- e. Pengadaan tambaha daya listrik untuk 5 (lima) Satker daerah;
- f. Pengadaan meubelair untuk 111 (seratus sebelas) Satker daerah;
- g. Pembangunan gedung kantor 7 (tujuh) Satrker baru yaitu Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Kejaksaan Negeri Bintan;
- h. Pengadaan brankas untuk 9 (sembilan) Satker baru;
- i. Pengadaan alat pemadam api ringan untuk seluruh Satker;
- j. Pengadaan 10 (sepuluh) unit speed boat;
- k. Renovasi pagar kantor untuk 11 (sebelas) Satker daerah;
- l. Pembangunan ruang diversi untuk 145 (seratus empat puluh lima) Satker di daerah;
- m. Anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang masih diblokir anggarannya menunggu hasil review BPKP sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah), direncanakan akan digunakan untuk :
 1. Pembangunan Gedung Pusat Pemulihan Aset dan Rehabilitasi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
 2. Pengadaan komputer, laptop dan printer untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

3. Pengadaan Tahap II Peralatan *Smart Security Identification*, *Surveillance Security System* dan *Centralized Interactive Monitor* ;
4. Pengadaan Mobil Penyuluhan Hukum Keliling untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahap I untuk 262 (dua ratus enam puluh dua) unit (dari jumlah seluruhnya 524 Satker daerah);
5. Pengadaan Mobil Dinas Tahap II untuk 16 Kajati, 31 Wakajati serta Mobil Operasional Eselon III, 186 Asisten, 31 Kabag TU Kejati, 241 Kajari, dan 5 mobil unit Operasional di Kejagung ;
6. Pengadaan Mobil Tahanan sebanyak 84 unit;
7. Pengadaan Sistem Pendukung Penyusunan Standar Organisasi, Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Stansar Prosedur Operasional;
8. Pengadaan Sistem Aspirasi dan Pengaduan Publik;
9. Pengadaan 3 unit speedboat (Kejari Bintuni, Cabjari Tanjung Batu dan Cabjari Pelabuhan Makasar).

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan sebesar Rp. 25.679.551.000,- (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan perincian kegiatan yaitu :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.030.508.000,- (satu miliar tiga puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan volume adalah 1 (*satu*) layanan antara lain: inspeksi umum, pemantauan, inspeksi

pimpinan, inspeksi kasus, inspeksi khusus, supervisi, video conference Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan *Whistleblowing System*, pelaksanaan Zona Integritas;

- c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara berupa kegiatan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi dengan volume output 36 (tiga puluh enam) lapdu pada masing-masing wilayah I s.d wilayah V, dan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus dengan volume output 12 (dua belas) lapdu pada masing-masing wilayah I s.d wilayah V;
- d. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi dan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi.
 - Pelaksanaan Inspeksi Umum pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 335 (tiga ratus lima puluh lima) kegiatan.
- e. Kegiatan Penilaian Jaksa dan Satuan Kerja Berprestasi di Tahun 2018;
- f. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kejaksaan Agung RI.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Alokasi Anggaran untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan adalah sebesar Rp. 98.259.268.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan, terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi, dengan volume output 1 (satu) layanan dimana pada kegiatan ini terdapat belanja pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI untuk TA 2018 yaitu sebesar Rp. 34.369.900.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan belanja operasional sebesar Rp. 23.766.146.000,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langgaranan daya dan jasa, honorarium pramubhakti, honorarium pengelola keuangan dan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang masuk kedalam Program Prioritas Nasional yaitu :
 - Diklat penanganan ABH berdasarkan UU SPPA sebanyak 3 (tiga) angkatan;
 - Diklat Illegal Fishing sebanyak 3 (tiga) angkatan;

- Diklat Mineral Batubara sebanyak 3 (tiga) angkatan;
- Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 3 (tiga) angkatan.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang tidak termasuk Prioritas Nasional antara lain Diklat Revolusi Mental, Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, Diklat Kasus Intelijen, Diklat Auditor dan Bendahara, Diklat Kehumasan, Diklat TP4, Diklat *Asset Recovery*, Diklat *Human Trafficking*, Diklat Manajemen dan Kepemimpinan dan lain-lain;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Alokasi Anggaran untuk Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam adalah sebesar Rp. 124.390.555.000,- (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 910.381.000,- (sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti, dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan volume adalah 1 (satu) layanan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Intelijen Bidang Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana sebanyak 50 (lima puluh) laporan;
 - Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebanyak 80 (delapan puluh) laporan;
 - Pelacakan Aset Tersangka Tindak Pidana sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kegiatan;
 - Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Tingkat Pusat (TP4P) sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Hasil Produksi dan sarana terhadap pelaksanaan Intelijen sebanyak 85 (delapan puluh lima) laporan;
 - Operasional Monitoring Center untuk 12 (dua belas) bulan layanan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Umum, dengan sasaran sebanyak 50 (lima puluh) laporan;
 - Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan volume output 8 (delapan) laporan kegiatan.
- f. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana dengan rincian kegiatan;
 - a. Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung sebanyak 16 (enam belas) kegiatan;
 - b. Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) kegiatan;

- c. Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) kegiatan;
- d. Kegiatan Tim Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Kejaksaan Agung sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan;
- e. Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) kegiatan yang merupakan kegiatan Program Prioritas Nasional;
- f. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 2.054 (dua ribu lima puluh empat) kegiatan yang merupakan kegiatan Program Prioritas Nasional.
- g. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) laporan;
 - Kegiatan Pelacakan Aset terkait Tindak Pidana di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) kegiatan.
- h. Kegiatan penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) kegiatan;
- i. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kegiatan.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp. 642.395.809.000,- (enam ratus empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 910.381.000,- (sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan volume adalah 1 (satu) layanan;
- c. Kegiatan Eksekusi Terpidana Mati sebanyak 12 (dua belas) orang terpidana;
- d. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 667 (enam ratus enam puluh tujuh) perkara;
- e. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung yang diselesaikan dalam tahap penuntutan dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) perkara;
- f. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di satker daerah yang merupakan Program Prioritas Nasional yang dapat dibiayai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu :
 - 87.538 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan) perkara tingkat Pra Penuntutan, Penuntutan dan Eksekusi;
 - Untuk Tahun 2018 terdapat kenaikan biaya penanganan perkara untuk satker yang memiliki jarak yang dekat dengan Pengadilan

dan Lembaga Pemasyarakatan yang semula sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per perkara. Sedangkan untuk satker yang memiliki jarak yang jauh dengan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang semula sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per perkara.

- g. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu yang diperuntukkan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*)/ perkara Kehutanan yang memerlukan biaya tinggi, yang merupakan Program Prioritas Nasional, yang dapat dibiayai di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah :
 - 559 (lima ratus lima puluh sembilan) perkara di tingkat Pra Penuntutan, Penuntutan dan Eksekusi dengan satuan biaya sebesar Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) per perkara.
- h. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme di Kejaksaan Agung dengan indikator kinerja sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara;
- i. Pelaksanaan ekstradisi warga negara asing yang tersangkut masalah hukum di Indonesia.

7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp. 300.388.029.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.497.416.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- b. Kegiatan layanan perkantoran dengan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan volume 1 (satu) layanan;
- c. Kegiatan Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 50 (lima puluh) perkara;
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara;
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya di selesaikan sebanyak 40 (empat puluh) perkara;
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan sebanyak 2 (dua) perkara;
 - Jumlah Penanganan Pra Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara.
- d. Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung, dengan volume yang akan dicapai adalah :
 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara;
 - Jumlah Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 1 (satu) perkara;
 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 30 (tiga puluh) perkara.

- e. Kegiatan Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi dengan indikator di Kejaksaan Agung, dengan volume yang akan dicapai adalah:
 - Pelaksanaan Eksaminasi Umum Perkara sebanyak 12 (dua belas) kegiatan;
 - Pelaksanaan Eksaminasi Khusus Perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara.
- f. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dengan volume yang akan dicapai sebagai berikut :
 - Jumlah Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) perkara;
 - Jumlah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) perkara;
 - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1.498 (seribu empat ratus sembilan puluh delapan) perkara;
 - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) perkara;
 - Jumlah Eksaminasi dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) perkara.

8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp. 22.467.731.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) layanan;
- b. Kegiatan Penanganan Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak dengan indikator perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non litigasi di Kejaksaan Agung sebanyak 96 (sembilan puluh enam) perkara;
- c. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dengan indikator perkara perdata yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara;
- d. Kegiatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara dengan indikator perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 60 (enam puluh) perkara;
- e. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan indikator terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu;
 - Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) perkara;
 - Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi sebanyak 2.457 (dua ribu empat ratus lima puluh tujuh) perkara;
 - Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejati dan Kejari dengan volume output 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) kegiatan.
- f. Dukungan penanganan gugatan perkara perdata dalam rangka mewakili Pemerintah RI di luar negeri.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 ini, maka diharapkan para pejabat Eselon I dan Eselon II di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Bidang Kejaksaan RI pada KJRI di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun, dan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar penilaian kinerja Kejaksaan RI semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *Reward* dari Kementerian Keuangan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara Pimpinan Satuan Kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan selama tahun 2018 ini, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di Pusat maupun di daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dapat semakin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN DAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 2018**

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

- Misi** :
1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
 2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
 3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah/Perdata dan Tata Usaha Negara;
 4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan	-	608.142.912.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
1080	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kegiatan Luar Negeri dan Kerja Sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Manajemen Eselon I 	1.116.000.000	KARO HUKUM DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	dan Kerjasama Hukum.		Ekstradis/MLA <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penelaahan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Perpustakaan Kejaksaan Agung RI 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Hukum 	1 layanan	1.472.759.000	HUBUNGAN LUAR NEGERI
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.		Laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan pegawai	Layanan Manajemen SDM	1 layanan	24.244.608.000	KARO KEPEGAWAIAN
1082	Pembinaan Pengelolaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Keajaasaan RI		<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perkantoran Laporan Pengelolaan Keuangan Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Keajaasaan 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengelolaan Penerimaan Pajak Keajaasaan Layanan Manajemen Keuangan 	1 layanan 1 layanan	791.271.000 9.923.693.000	KARO KEUANGAN
1083	Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Keajaasaan RI Laporan Pemantauan dan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Laporan Hasil Pengelolaan Data 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perkantoran Laporan Hasil Pengelolaan Data yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Layanan Perencanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi 	1 layanan 1 layanan 1 layanan	614.165.000 3.530.620.000 795.210.000	KARO PERENCANAAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
			yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Organisasi Manajemen 	1 layanan	7.001.952.000
1084	Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI		<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pegawai Kejaksaan RI. Layanan Perkantoran Operasional ULP dan LPSE 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Manajemen BMN Layanan Perkantoran 	1 layanan	4.875.471.000
1085	Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Kesekretariatan, Keamanan, Protokol, Bina Kesejahteraan Pegawai, dan Pimpinan Layanan Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Umum Layanan Perkantoran 	1 layanan 1 layanan	3.305.081.000 55.566.164.000
1088	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi		Tersedianya Basis Data yang Dapat Menyajikan Informasi Data Perkara Secara Akurat, Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Penanganan Perkara Secara Cepat dan Akutabel Serta Dapat Diakses Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Pilot Project SPPT Berbasis IT Layanan Data dan Informasi Layanan Perkantoran 	1 laporan 1 layanan 12 layanan	39.903.275.000 41.249.730.000 36.248.810.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1089	Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia		Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Keilmuan dan Kegiatan Lainnya.	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1 layanan	1.971.250.000	KAPUS LITBANG
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari		Jumlah Pelayanan Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	1.000.000.000	SFESJAM PEMBINAAN
5276	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset Yang Terkait Perkara		Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang Terkait dengan Hasil Kejahatan Pelayanan Ketatausahaan dan Birokrasi serta Penyusunan Rencana Program Kerja 	1 laporan 1 layanan	3.548.300.000 3.126.865.000	KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana perlengkapan bangunan	-	-	995.146.778.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
1091	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahunan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	12 sarana	995.146.778.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah menyelesaikan permasalahan sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Persentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur litigasi dan non litigasi Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata 	-	9.091.981.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	
1120	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		Jumlah Kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Berkoordinasi dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	5.340.541.000	SESJAM DATUN
1116	Penanganan Pemulihan dan Perlindungan Hak		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan Hak yang diselesaikan di Kejaksaan Agung Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi 	Pemulihan dan Perlindungan Hak Melalui Litigasi di Kejaksaan Agung	96 perkara	1.559.040.000	DIREKTUR PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN HAK
1117	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata		Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	Perkara perdata yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	75 perkara	1.218.000.000	DIREKTUR PERDATA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1118	Peningkatan Perkara Tata Usaha Negara Penanganan Perkara Tata Usaha Negara		Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan	Perkara tata usaha negara yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	60 perkara	974.400.000	DIREKTUR TATA USAHA NEGARA

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
TAHUN 2018**

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah/Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT			VOLUME/ SATUAN
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbukanya perkara tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan in kracht • Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana • Persentase kepuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan 	-	-	23.095.039.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1109	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		Jumlah Kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Sesuai Peraturan yang Berlaku Khususnya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perkantoran 	1 layanan	8.941.378.000	SESJAM PIDUM
					1 layanan	910.381.000	
1105	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda		Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	667 perkara	2.001.000.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMINEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
			Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan di Kejaksaan Agung	450 perkara	6.181.800.000	
1106	Panganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum		Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Tahap Penuntutan	Perkara terorisme dan tindak pidana lintas negara	72 perkara	4.983.840.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMINEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL
1107	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya		Jumlah penanganan perkara tindak Pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kehutanan di tingkat penyidikan lanjutan	Penyidikan lanjutan Tindak Pidana Kehutanan	2 perkara	76.640.000	DIREKTUR TINDAK PIDANA KAMINEGTIBUM, ORHADA DAN TPUL

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
TAHUN 2018**

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah/Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT			VOLUME/ SATUAN
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara • Meningkatkan penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus • Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan 	-	-	28.664.819.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT			VOLUME/ SATUAN
			masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus				
1115	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		Jumlah Pelayanan Kesekretariatan di Bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perkantoran 	1 layanan	10.801.183.000	SESJAM PIDSUS
1110	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat.		Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Agung Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Agung 	50 perkara	2.272.500.000	DIREKTUR PENYIDIKAN
			Jumlah Penyelidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan		75 perkara	5.134.875.000	
					40 perkara	488.500.000	
			Jumlah Penyelidikan Perkara Pelanggaran HAM berat yang diselesaikan		2 perkara	320.275.000	
					25 perkara	111.150.000	
1111	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan		Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam Tahap	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap	140 perkara	5.646.970.000	DIREKTUR

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Agung.		tahap pra penuntutan dan penuntutan	Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung			PENUNTUTAN
			Jumlah Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	1 perkara	42.250.000	
			Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	30 perkara	1.242.000.000	
1113	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Pidana Korupsi).		Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksekusi dan Eksaminasi	Pelaksanaan eksaminasi umum perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya/pelanggaran HAM yang berat di Kejaksaan Agung	12 perkara	477.000.000	DIREKTUR EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
				Pelaksanaan eksaminasi khusus perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya/pelanggaran HAM yang berat di Kejaksaan Agung	10 perkara	630.700.000	

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
TAHUN 2018**

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah/Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT VOLUME/ SATUAN		
006.01.06	Program Penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum dan hankam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara • Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	-	22.981.759.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1104	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan dibidang kesekretariatan dilingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen sesuai peraturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 	1 layanan	5.685.337.000	SESJAM INTELIJEN
				<ul style="list-style-type: none"> • layanan Perkantoran 	1 layanan	910.381.000	
1099	Pelaksanaan Kegiatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan intelijen dibidang penyelamatan Keuangan Negara dan penanggulangan Tindak Pidana • Laporan hasil Kegiatan Pelacakan Aset terkait Tindak Pidana • Jumlah laporan hasil operasi intelijen bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	50 ltk	831.000.000	DIREKTUR I
				Pelacakan Aset terkait Tindak Pidana	70 keg	1.492.500.000	
				Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	80 perkara	1.548.800.000	
				Tim Pengawasan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P)	20 keg	1.054.500.000	
1100	Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil kegiatan dalam rangka pengamanan informasi intelijen • Operasional Monitoring Center 	Laporan Hasil Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Intelijen	85 ltk	1.402.000.000	DIREKTUR III
				Operasional Monitoring Center	12 bulan layanan	1.741.610.000	
1101	Pelaksanaan Kegiatan Politik Sosial Budaya dan Sumber		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil Kegiatan Intelijen bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan 	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan	50 ltk	996.000.000	DIREKTUR II

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Daya Organisasi		Keterangan umum • Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan	Keterangan Umum Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Agung	8 laporan	1.430.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum		• Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana	Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung Media / Sarana Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Hukum	16 kegiatan 10 media / sarana	3.338.425.000 2.551.206.000	KAPUSPENKUM

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
TAHUN 2018**

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah/Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT			VOLUME/ SATUAN
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya masyarakat kepercayaan terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penanganan masyarakat (Lapdu) penyelesaian pengaduan satker yang melaksanakan secara memadai system pengendalian • Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	14.888.925.000	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan		Jumlah Kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pengawasan Dalam Berkoordinasi dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan	Tim Saber Pungli	6 Laporan	933.955.000	SESJAM PENGAWASAN
				Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	11.874.462.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	1.030.508.000	
1092	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di wilayah I		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah I	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah I	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR I
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah I	12 lapdu	87.600.000	
1093	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah II	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR II
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah II	12 lapdu	87.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1094	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah III.		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah III	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah III	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR III
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah III	12 lapdu	87.600.000	
1095	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah IV.		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah IV	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah IV	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR IV
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah IV	12 lapdu	87.600.000	
1096	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas pokok dan wewenang di wilayah V.		Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah V	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi pada wilayah V	36 lapdu	122.400.000	INSPEKTUR V
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus pada Wilayah V	12 lapdu	87.600.000	

**RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIKLAT
TAHUN 2018**

Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Visi : "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional Dan Akuntabel".

Misi :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Penegetahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi • Indeks kepuasan peserta diklat • Indeks kepuasan stakeholder 	-	98.259.268.000	KEPALA BADAN DIKLAT
5006	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.		Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Diklat penanganan ABH berdasarkan UU SPPA	1.034.101.000	SEKRETARIS BADAN DIKLAT/ KEPALA PUSAT DIKLAT
				Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	8.327.911.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT VOLUME/ SATUAN		
				Diklat Teknis Aparatur Kejaksaan Diklat Penyelidikan kasus Intelijen Diklat illegal fishing Diklat Mineral Batubara Diklat kebakaran hutan dan lahan	11.823.820.000 1.132.549.000 1.034.101.000 1.034.101.000 1.034.101.000	
5007	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan		Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	8.760.145.000	
5008	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawain, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perengkapan, perustakaan dan dokumentasi. Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah 	Layanan dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perkantoran Sarana dan Prasarana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan	2.229.500.000 58.136.046.000 2.229.500.000	

RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI BANGKOK TAHUN 2018

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Indeks kepuasan pelayanan internal 		2.123.508.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI BANGKOK
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok		<ul style="list-style-type: none"> • Operasional atase teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri • Layanan Perkantoran 	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.119.908.000	
				Layanan Perkantoran	1.003.600.000	1 layanan

RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI HONGKONG TAHUN 2018

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Manajemen Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 		2.230.124.000	
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Riyedh		<ul style="list-style-type: none"> Operasional atase teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri Layanan Perkantoran 	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perkantoran	1.180.884.000 989.240.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI HONGKONG
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	60.000.000	
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	60.000.000	6 Sarana/ prasarana

RENCANA KERJA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI RIYADH TAHUN 2018

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN		ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT		
006.01.01	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 		2.065.372.000	KEPALA PERWAKILAN KEJAKSAAN RI DI RIYADH
1080	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Perwakilan Kejaksaan RI di Riyadh		<ul style="list-style-type: none"> Operasional atase teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri Layanan Perkantoran 	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.276.129.000	1 layanan
				Layanan Perkantoran	789.243.000	1 layanan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	104.253.799.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	563.122.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	1.198.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	2 Sarana/ Prasarana	1.198.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	629.935.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	2 kegiatan 135 Lapdu	47.735.000 459.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.430.976.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 5 laporan 19 laporan	53.016.000 68.200.000 195.820.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	7 laporan	101.500.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KAJATI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	10 Kegiatan	94.600.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	28 kegiatan	168.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	11 kegiatan	300.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	40 kegiatan	312.000.000	
				-	-	11.350.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.460 perkara	1.609.950.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.500 perkara	9.066.570.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2.501 perkara	673.480.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	2.974.620.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	300.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5 perkara	250.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	5 Perkara	500.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	475.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	2 perkara	416.600.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W.I.I	4 perkara	795.420.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	25.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	10 perkara	62.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	Negeri, dan Cabjari	-	295.495.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	13 perkara	151.495.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	33 perkara	104.040.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	72 perkara	39.960.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JABAR.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	235.602.914.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	3.665.268.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	231.937.646.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	5.956.705.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) • Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai • Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	586.889.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>25 kegiatan</p> <p>100 Lapdu</p> <p>20 Lapdu</p>	<p>201.969.000</p> <p>260.880.000</p> <p>124.040.000</p>	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	5.346.176.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>3 laporan</p> <p>25 laporan</p> <p>79 laporan</p>	<p>53.016.000</p> <p>341.000.000</p> <p>753.820.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	27 laporan	391.500.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	50 Kegiatan	473.000.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	108 kegiatan	648.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	51 kegiatan	1.300.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	160 kegiatan	1.248.000.000
				-	-	27.860.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5.065 perkara	3.825.380.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5070 perkara	18.698.160.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	5071 perkara	2.476.460.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	80.300.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	2.579.700.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	200.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	11.976.980.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		Pidana Khusus sesuai KUHAP <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W/II	3 perkara 3 perkara 34 kasus 40 Perkara 4 Perkara 3 perkara 2 perkara	150.000.000 300.000.000 1.700.000.000 4.000.000.000 1.050.000.000 264.960.000 353.520.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	34 perkara	1.611.600.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	29 perkara	2.421.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	42 perkara	75.400.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	642.805.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terseleksikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terseleksikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	7 perkara	84.805.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	133 perkara	399.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	26 perkara	159.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH		S A S A R A N			FORMULIR RKT		
		TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	256.854.374.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.705.808.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	Layanan Perkantoran	12 Laporan	255.148.566.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	12 Sarana/ Prasarana	18.365.681.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 03	Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	529.517.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	35 Kegiatan 70 Lapdu	328.867.000 148.650.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perduta dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	7.563.196.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Kejaksanaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Laporan 37 Laporan 114 Laporan	53.016.000 504.680.000 1.073.680.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari</p> <p>Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap</p> <p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	<p>38 Laporan</p> <p>4 Kegiatan</p> <p>4 Kegiatan</p> <p>73 Kegiatan</p> <p>154 kegiatan</p> <p>74 kegiatan</p> <p>228 kegiatan</p>	<p>551.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>37.840.000</p> <p>690.580.000</p> <p>924.000.000</p> <p>1.850.000.000</p> <p>1.778.400.000</p>	<p>KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI</p>
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	31.126.270.000	KAJATI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5.377 Perkara	4.645.238.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5.359 Perkara	20.990.350.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	5.360 Perkara	2.630.682.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 Perkara	27.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 Perkara	2.732.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 Perkara	100.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus 	-	-	15.211.410.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		<p>dan mencari keadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil</p>	<p>5 Perkara</p> <p>10 Perkara</p> <p>42 Perkara</p> <p>43 Perkara</p> <p>3 Perkara</p> <p>5 Perkara</p>	<p>250.000.000</p> <p>1.000.000.000</p> <p>2.100.000.000</p> <p>4.300.000.000</p> <p>264.960.000</p> <p>1.481.730.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII.II	30 Perkara	1.422.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII.III	31 Perkara	4.258.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	67 Perkara	84.220.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	891.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 Perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Non litigasi)	190 Perkara	570.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	444 Perkara	225.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI DIY		S A S A R A N			FORMULIR RKT		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	98.050.972.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukung Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Laporan	2.025.094.000 96.025.878.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	3.313.268.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	3.313.268.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	130.300.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	2 kegiatan 20 Lapdu	25.000.000 68.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.430.976.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 5 laporan	53.016.000 68.200.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	19 laporan	195.820.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	7 laporan	101.500.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	4 kegiatan 10 Kegiatan	37.840.000 94.600.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	28 kegiatan	168.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	12 kegiatan	300.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	40 kegiatan	312.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	7.980.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1,090 perkara	2.025.600.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1,150 perkara	4.193.370.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1,151 perkara	331.030.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5 perkara	13.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5 perkara	1.370.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	5 perkara	46.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	2.503.350.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		Pidana Khusus sesuai KUHAP <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	2 perkara 2 perkara 6 perkara 9 Perkara 4 Perkara 4 Perkara 3 perkara	100.000.000 200.000.000 300.000.000 900.000.000 50.000.000 201.640.000 662.850.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p> <p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p>	<p>1 perkara</p> <p>12 perkara</p>	<p>50.000.000</p> <p>38.860.000</p>	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	247.035.000	KAJATI	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di 	<p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/</p>	<p>9 perkara</p> <p>33 perkara</p>	<p>109.035.000</p> <p>99.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
			Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Cabjari (Non litigasi)		
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	72 perkara	39.000.000

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR		S A S A R A N			FORMULIR RKT		
		TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01. 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	284.070.201.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	3.796.710.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	Layanan Perkantoran	1 Laporan	280.273.491.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	16.837.926.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01. 03	Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	414.378.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	38 Kegiatan	250.878.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Cabari	25 Lapdu	111.250.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	11 Lapdu	52.250.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabari	-	7.941.056.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	53.016.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38 Laporan	518.320.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	118 Laporan	1.116.520.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	40 Laporan	580.000.000
				Burou tindak pidana/DPO yang ditangkap	5 Kegiatan	150.000.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari.</p>	4 Kegiatan	37.840.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	160 Kegiatan	960.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	78 Kegiatan	1.950.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	238 kegiatan	1.856.400.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermartabat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan 	-	-	48.610.000.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<p>masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari</p>	<p>12.428 Perkara</p> <p>12.252 Perkara</p> <p>12.253 Perkara</p> <p>10 Perkara</p> <p>10 Perkara</p> <p>10 Perkara</p>	<p>7.484.800.000</p> <p>35.507.450.000</p> <p>2.757.750.000</p> <p>27.500.000</p> <p>2.732.500.000</p> <p>100.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	23.252.540.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	5 Perkara	250.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	5 Perkara	500.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	69 Perkara	3.450.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	76 Perkara	7.600.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	7 Perkara	1.629.230.000
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	6 Perkara	264.960.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	4 Perkara	1.281.510.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	34 Perkara	1.611.600.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	67 Perkara	6.465.500.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p> <p>-</p>	103 Perkara	149.740.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	<p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)</p> <p>Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis</p>	9 Perkara 196 Perkara 466 Perkara	109.035.000 594.000.000 237.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI ACEH.		S A S A R A N				FORMULIR RKT	
						ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	S A S A R A N	
						ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase sather yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	124.166.362.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.700.552.000	KAJATI/KAJA RI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	31.573.485.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	12 Sarana/ Prasarana	31.573.485.000	KAJATI/KAJA RI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase sather yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	465.789.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	32 Kegiatan	189.049.000	KAJATIVKAJA R DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	60 Lapdu	204.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	10 Lapdu	72.740.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSEBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Persentase satter yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamaman/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.580.456.000	KEJATI/ KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamaman/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamaman di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamaman/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	53.016.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksanaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksanaan Negeri Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	25 Laporan 77 Laporan 25 Laporan 2 Kegiatan	341.000.000 723.940.000 362.500.000 100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		• Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana • Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	4 Kegiatan 48 Kegiatan 100 Kegiatan	37.840.000 454.080.000 600.000.000	KEJATI/ KEJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N				ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN			
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejati. Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) 	<ul style="list-style-type: none"> 24 Kegiatan 146 Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1.200.000.000 1.138.800.000 	KAJATI	
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada 	<ul style="list-style-type: none"> 3.233 perkara 3.233 perkara 	<ul style="list-style-type: none"> 5.146.120.000 13.313.110.000 	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Negeri	Kejati/Kejari/Cabjari			
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	3.234 perkara	984.770.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	27.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	2.732.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	100.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan pemulihan keuangan Negara serta kerugian Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan terhadap masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian 	-	-	11.471.520.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Kejaksanaan RI	<p>perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 Perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 Perkara	300.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	27 Perkara	13.500.000.000	
			Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabjari	29 Perkara	2.900.000.000		
			Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	1.050.000.000		
			Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	3 Perkara	264.960.000		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari			
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wl.I	6 Perkara	265.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wl.III	7 Perkara	331.800.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wl.III	46 Perkara	4.738.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan	39 Perkara	71.620.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan pemulihan kewibawaan keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	-	618.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 Perkara	96.920.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	125 Perkara	375.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	288 Perkara	147.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	210.114.745.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	3.670.345.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	206.444.400.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	11.645.377.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	1.076.500.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>28 kegiatan</p> <p>150 Lapdu</p> <p>25 Lapdu</p>	<p>524.100.000</p> <p>435.000.000</p> <p>117.400.000</p>	KAJATIVKAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	6.556.396.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>3 laporan</p> <p>37 laporan</p> <p>97 laporan</p>	<p>53.016.000</p> <p>504.680.000</p> <p>954.160.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelecaakan Aset di Kejati dan Kejari	30 laporan	435.000.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	3 kegiatan	150.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	65 Kegiatan	614.900.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	138 kegiatan	828.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	58 kegiatan	1.450.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	196 kegiatan	1.528.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 	-	-	46.066.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<p>bidang Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari</p>	<p>5.399 perkara</p> <p>5.279 perkara</p> <p>5.280 perkara</p> <p>54 perkara</p> <p>44 perkara</p> <p>44 perkara</p>	<p>6.965.600.000</p> <p>23.712.700.000</p> <p>2.231.700.000</p> <p>781.000.000</p> <p>12.155.000.000</p> <p>220.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa 	-	17.433.280.000	KAJATI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHPAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	5 perkara	250.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	12 perkara	1.200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	44 perkara	2.200.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	48 Perkara	4.800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati/Kejari/Cabjari	5 Perkara	603.010.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	3 perkara	397.710.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	8 perkara	379.200.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	73 perkara	7.407.800.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	57 perkara	95.560.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	757.035.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terseleskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terseleskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	9 perkara	109.035.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	160 perkara	471.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	348 perkara	177.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	151.631.777.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	1.250.564.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	5.448.959.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	5.448.959.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	269.606.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi	3 Kegiatan	167.906.000	KAJATI/KAJAJA R DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	45 Lapdu	76.906.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	5 Lapdu	25.300.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	3.966.296.000	KEJATI/ KEJARI/ DAN CABJARI
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangskapan Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	24 Laporan	339.456.000	
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangskapan Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	13.640.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	64 Laporan	580.480.000	
				Laporan Pelaksanaan	18 Laporan	261.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari</p> <p>Burou tindak pidana/DPO yang ditangkakp</p> <p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari.</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	<p>2 Kegiatan</p> <p>40 Kegiatan</p> <p>2 Kegiatan</p> <p>84 Kegiatan</p> <p>23 Kegiatan</p> <p>118 Kegiatan</p>	<p>100.000.000</p> <p>378.400.000</p> <p>18.920.000</p> <p>504.000.000</p> <p>850.000.000</p> <p>920.400.000</p>	<p>KEJATI/ KEJARI DAN KACABJARI</p>
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	18.978.000.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang	3.365	4.947.075.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	perkara		KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3.365 perkara	8.316.524.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, ekaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	3.366 perkara	1.424.401.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	49 perkara	555.148.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	49 perkara	3.576.786.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	49 perkara	158.066.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanankan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan 	-	-	8.025.230.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 				KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	100.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 Perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	23 Perkara	1.150.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	23 Perkara	2.300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	629.510.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	4 Perkara	189.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	5 Perkara	220.950.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	15 Perkara	660.150.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	29 Perkara	2.421.500.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	100.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	31 Perkara	53.980.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	483.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 Perkara	96.920.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	92 Perkara	282.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	204 Perkara	105.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI RIAU.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	84.573.284.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.290.807.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	5.141.673.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	2 Sarana/ Prasarana	5.141.673.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	210.300.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>12 kegiatan</p> <p>30 Lapdu</p> <p>5 Lapdu</p>	<p>71.000.000</p> <p>102.000.000</p> <p>37.300.000</p>	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	2.801.296.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>3 laporan</p> <p>12 laporan</p> <p>40 laporan</p>	<p>53.016.000</p> <p>163.680.000</p> <p>391.120.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	14 laporan	203.000.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	4 kegiatan 24 Kegiatan	37.840.000 227.040.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	56 kegiatan	336.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	26 kegiatan	650.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	82 kegiatan	639.600.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	29.036.030.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3740 perkara	3.903.030.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3.840 perkara	15.061.876.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	3.841 perkara	1.491.124.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	30 perkara	82.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	30 perkara	8.197.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	30 perkara	300.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	6.503.630.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		Pidana Khusus sesuai KUHAP <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.	3 perkara 3 perkara 18 kasus 18 Perkara 6 Perkara 3 perkara 2 perkara	150.000.000 300.000.000 900.000.000 1.800.000.000 1.075.000.000 189.140.000 751.230.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	12 perkara	568.800.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	8 perkara	668.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	22 perkara	51.460.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	381.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	8 perkara 68 perkara 156 media	96.920.000 204.000.000 81.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI JAMBI.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	71.041.488.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	777.606.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	6.092.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	6.092.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	399.246.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	3 kegiatan 30 Lapdu	207.726.000 102.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.537.096.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 12 laporan	53.016.000 163.660.000	
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri 	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38 laporan	361.240.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	12 laporan	174.000.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditanggakap	2 kegiatan	100.000.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	4 kegiatan 22 Kegiatan	37.840.000 208.120.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	52 kegiatan	312.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	11 kegiatan	550.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	74 kegiatan	577.200.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	15.790.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.680 perkara	2.863.500.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.680 perkara	7.819.420.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2.681 perkara	817.080.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	15 perkara	41.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	15 perkara	4.098.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	15 perkara	150.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	5.132.980.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	13 kasus	650.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	18 Perkara	1.800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	350.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	1 Perkara	356.730.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	4 perkara	189.140.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan/Cabjari WII	1 perkara	356.730.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan/Cabjari WII.II	6 perkara	284.400.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan/Cabjari WII.III	13 perkara	1.060.150.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	18 perkara	92.560.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	330.805.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	7 perkara	84.805.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	61 perkara	177.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 perkara	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	129.371.688.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	610.960.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	128.760.728.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	17.277.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	466.778.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>30 kegiatan</p> <p>12 Lapdu</p> <p>12 Lapdu</p>	<p>258.258.000</p> <p>119.000.000</p> <p>89.520.000</p>	KAJATIVKAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perduta dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	3.317.776.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>3 laporan</p> <p>15 laporan</p> <p>49 laporan</p>	<p>53.016.000</p> <p>204.600.000</p> <p>474.820.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelecaakan Aset di Kejati dan Kejari	17 laporan	246.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	34 kegiatan	321.640.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	16 kegiatan	800.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	94 kegiatan	733.200.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	26.380.000.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap	5,159	5.258.202.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	perkara 5.159 perkara 5.160 perkara 20 perkara 20 perkara 20 perkara	14.407.378.000 994.420.000 55.000.000 5.465.000.000 200.000.000	DAN KACABJARI
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 	-	8.147.890.000	KAJATI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>bidang Pidana Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	4 perkara	700.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	7 perkara	700.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18 perkara	900.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	27 Perkara	2.600.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	9 Perkara	325.500.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	3 Perkara	189.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W/II	2 perkara	2.626.750.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p> <p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p>	<p>1 perkara</p> <p>32 perkara</p>	<p>50.000.000</p> <p>56.500.000</p>	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	438.920.000	KAJATI	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di 	<p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/</p>	<p>8 perkara</p> <p>83 perkara</p>	<p>96.920.000</p> <p>249.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Cabjari (Non litigasi)			
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	180 perkara	93.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	98.107.025.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	509.988.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	19.950.000.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	19.950.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	232.010.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>12 kegiatan</p> <p>35 Lapdu</p> <p>5 Lapdu</p>	<p>74.100.000</p> <p>119.000.000</p> <p>38.910.000</p>	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantaran) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	2.714.416.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari</p> <p>Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapp</p>	<p>3 laporan</p> <p>14 laporan</p> <p>12 laporan</p> <p>2 kegiatan</p>	<p>53.016.000</p> <p>190.960.000</p> <p>174.000.000</p> <p>100.000.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati/Cabiari</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Media/sarana Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Hukum (PAKEM)</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	<p>4 kegiatan</p> <p>24 kegiatan</p> <p>56 kegiatan</p> <p>42 Media</p> <p>24 kegiatan</p> <p>78 kegiatan</p>	<p>37.840.000</p> <p>227.040.000</p> <p>336.000.000</p> <p>387.160.000</p> <p>600.000.000</p> <p>608.400.000</p>	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	15.062.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.337 perkara	2.787.180.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.337 perkara	8.471.757.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2.338 perkara	943.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	15 perkara	728.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	2.020.900.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	111.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	7.686.640.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	4 perkara	400.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18 kasus	900.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	27 Perkara	2.700.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	6 Perkara	575.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	1 Perkara	176.640.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	2 perkara	625.080.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	19 perkara	900.600.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	12 perkara	1.119.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	25.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	37 perkara	115.320.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	369.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	115.720.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	62 perkara	185.200.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 Perkara	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	73.412.348.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	866.900.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	9.258.390.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	9.258.390.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	254.046.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	6 kegiatan 30 Lapdu	121.906.000 95.040.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.732.856.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 13 laporan	53.016.000 177.320.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	37 laporan	389.140.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	13 laporan	188.500.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	25 Kegiatan	227.040.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	56 kegiatan	336.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	24 kegiatan	600.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	80 kegiatan	624.000.000
				-	-	18.850.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.040 perkara	3.050.016.000
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.040 perkara	7.493.412.000
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2.041 perkara	1.156.572.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	25 perkara	68.750.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	18 perkara	6.831.250.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	18 perkara	250.000.000
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	4.989.240.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		Pidana Khusus sesuai KUHAP <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W/II	1 perkara 2 perkara 13 perkara 13 Perkara 3 Perkara 4 Perkara 2 perkara	50.000.000 200.000.000 650.000.000 1.300.000.000 37.500.000 489.140.000 1.878.240.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	4 perkara	176.760.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	2 perkara	94.800.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	75.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	29 perkara	37.800.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	366.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	65 perkara	195.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	144 perkara	75.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALTENG.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	69.170.956.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.148.045.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	68.022.911.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	4 Sarana/ Prasarana	2.289.800.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	235.844.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>10 kegiatan</p> <p>12 Lapdu</p> <p>5 Lapdu</p>	<p>79.544.000</p> <p>119.000.000</p> <p>37.300.000</p>	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantaran) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	3.256.476.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari</p> <p>Buron tindak pidana/DPO yang ditangkapp</p>	<p>18 laporan</p> <p>48 laporan</p> <p>16 laporan</p> <p>2 kegiatan</p>	<p>257.616.000</p> <p>459.880.000</p> <p>232.000.000</p> <p>100.000.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N				PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	33 kegiatan	312.180.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	17.260.000.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p>	1599 perkara	3.156.942.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
					1699 perkara	7.721.574.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1700 perkara	661.484.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	5.465.000.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	200.000.000
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktnya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	6.655.900.000
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari			Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	22 perkara	1.100.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
			Cabang Kejaksaan Negeri <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	23 perkara	2.300.000.000
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	13 kasus	650.000.000
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	18 Perkara	1.800.000.000
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	7 Perkara	87.500.000
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	1 Perkara	356.730.000
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	3 perkara	689.140.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WilI	4 perkara	176.760.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di	17 perkara	805.800.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Kejari/Cabjari Wil.II		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	14 perkara	1.396.500.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	25.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	20 perkara	75.200.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	426.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	79 perkara	237.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	180 perkara	93.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	84.582.473.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukung Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	592.752.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	83.989.721.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	2 Sarana/ Prasarana	3.751.300.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	219.837.000	KAJATI

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	3 kegiatan 19 Lapdu	82.292.000 79.855.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.997.056.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 13 laporan 43 laporan	53.016.000 177.320.000 419.020.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	15 laporan	217.500.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditanggkapp	2 kegiatan	100.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	26 Kegiatan	245.960.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	60 kegiatan	360.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	15 kegiatan	700.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	88 kegiatan	686.400.000
				-	-	22.720.000.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5.155 perkara	5.654.445.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5.175 perkara	7.571.840.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	5.176 perkara	3.773.715.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	5.465.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	200.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	6.837.660.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati</p> <p>Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII.III</p>	<p>3 perkara</p> <p>6 perkara</p> <p>16 perkara</p> <p>21 Perkara</p> <p>6 Perkara</p> <p>4 Perkara</p> <p>38 perkara</p>	<p>650.000.000</p> <p>600.000.000</p> <p>799.990.000</p> <p>2.100.000.000</p> <p>75.000.000</p> <p>189.140.000</p> <p>2.317.030.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	26 perkara	106.500.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	8 perkara 73 perkara	96.920.000 219.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
					168 perkara	87.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	76.739.765.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	855.889.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	75.883.876.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	3.284.780.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	343.006.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>13 kegiatan</p> <p>20 Lapdu</p> <p>5 Lapdu</p>	<p>238.706.000</p> <p>67.000.000</p> <p>37.300.000</p>	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantaran) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	2.997.056.000	
				<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pelaksanaan Aset di Kejati dan Kejari</p>	<p>16 laporan</p> <p>43 laporan</p> <p>15 laporan</p>	<p>230.336.000</p> <p>419.020.000</p> <p>217.500.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Burton tindak pidana/DPO yang ditangkapp</p> <p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejati/Cabjari</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejati.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	<p>2 kegiatan</p> <p>4 kegiatan</p> <p>26 Kegiatan</p> <p>60 kegiatan</p> <p>14 kegiatan</p> <p>88 kegiatan</p>	<p>100.000.000</p> <p>37.840.000</p> <p>245.960.000</p> <p>360.000.000</p> <p>700.000.000</p> <p>686.400.000</p>	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	24.125.300.000	KAJATI	
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada	2834 perkara	2.842.740.000	KAJATI/KAJARI DAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negeri		Kejaksaaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2834 perkara	10.594.600.000	KACABJARI
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2835 perkara	1.249.960.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	32 perkara	90.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	33 perkara	9.017.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	33 perkara	330.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 	-	-	10.541.130.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>bidang Pidana Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	21 kasus	1.050.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	24 Perkara	2.400.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	550.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	3 perkara	189.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W.I.I	3 perkara	397.710.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	33 perkara	5.544.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III			
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	29 perkara	60.280.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	402.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejan dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejati, Kejari maupun Cabjari Penanganannya • Tersesajikannya perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum	Perkar Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	73 perkara	219.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	168 perkara	87.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA		S A S A R A N			FORMULIR RKT		
		TUJUAN	INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	66.637.888.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.511.740.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	Layanan Perkantoran	1 Laporan	65.126.148.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	7.245.700.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	256.700.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	3 Kegiatan 12 Lapdu	157.500.000 48.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perduta dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	2.732.856.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Cabang Kejaksaan Negeri/Kejaksaaan Negeri</p>	3 Laporan 13 Laporan	53.016.000 177.320.000	
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	41 Laporan	389.140.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	13 Laporan	188.500.000	
				Buruk tindak pidana/DPO yang ditangkap	2 Kegiatan	100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	4 Kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	56 Kegiatan	336.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	12 Kegiatan	600.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	80 Kegiatan	624.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP 	-	-	21.584.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1,414 Perkara 1,414 Perkara	2.818.450.000 5.470.640.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1,415 Perkara	710.910.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	38 Perkara	121.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	34 Perkara	12.023.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	36 Perkara	440.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus 	-	-	6.698.480.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		dan mencari keadilan • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	2 Perkara 2 Perkara 18 Perkara 18 Perkara 5 Perkara 2 Perkara	100.000.000 200.000.000 900.000.000 1.800.000.000 762.500.000 2.634.140.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p> <p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p>	<p>5 Perkara</p> <p>21 Perkara</p>	<p>251.640.000</p> <p>50.200.000</p>	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyediaan serta pemulihan keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	366.920.000	KAJATI	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	<p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p>	<p>8 Perkara</p> <p>65 Perkara</p>	<p>96.920.000</p> <p>195.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none">Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	144 Perkara	75.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULTENG.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	65.911.322.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	756.806.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	65.154.516.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	5.631.800.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	357.310.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	2 kegiatan 10 Lapdu	265.510.000 40.800.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	3.301.016.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan Cabjari Pengawasan Aliran Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 24 laporan 62 laporan	53.016.000 327.360.000 516.760.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	12 laporan	174.000.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Burton tindak pidana/DPO yang ditanggkapp	2 kegiatan	100.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KAJATI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	34 Kegiatan	321.640.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	76 kegiatan	456.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	11 kegiatan	550.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	98 kegiatan	764.400.000	
				-	-	19.946.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.685 perkara	2.376.480.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.645 perkara	9.539.489.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1.646 perkara	880.031.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	25 perkara	68.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	25 perkara	6.831.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	25 perkara	250.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktnya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	9.551.900.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	300.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	28 kasus	1.400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	27 Perkara	2.800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	5 Perkara	562.500.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	4 perkara	189.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W/II	6 perkara	265.140.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	39 perkara	3.763.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	3 perkara	53.780.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	35 perkara	67.840.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	369.805.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	7 perkara	84.805.000	KAJATI/KAJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> • terseleskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	72 perkara	216.000.000	DAN KACABJARI
					132 perkara	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	172.999.615.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	3.485.875.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	12.845.080.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	2 Sarana/ Prasarana	12.845.080.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	699.200.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	1 kegiatan 120 Lapdu	310.000.000 133.800.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	6.506.396.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	40 laporan 106 laporan 30 laporan 2 kegiatan	557.696.000 954.160.000 435.000.000 100.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari. Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	69 kegiatan 138 kegiatan 58 kegiatan 196 kegiatan	652.740.000 828.000.000 1.450.000.000 1.528.800.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	30.722.000.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	4.294 perkara 4.294 perkara	4.491.850.000 18.259.270.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	4.295 perkara	2.250.880.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	22 perkara	5.465.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	200.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	19.152.790.000	KAJATI
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	40 perkara	2.000.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	20 perkara	2.000.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	43 kasus	2.150.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	44 Perkara	4.400.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	30 Perkara	1.375.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	6 perkara	264.960.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.I	1 perkara	6.823.570.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	53 perkara	139.260.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	744.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	157 perkara	471.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	348 media	177.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI SULTRA.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	59.602.727.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.310.044.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	9.264.382.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	9.264.382.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	191.011.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	3 kegiatan 12 Lapdu	85.711.000 68.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.409.776.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pelaksanaan	3 laporan 10 laporan 34 laporan 12 laporan	53.016.000 136.400.000 335.320.000 174.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari			
				Burou tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari.	4 kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	48 kegiatan	288.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	11 kegiatan	550.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	70 kegiatan	546.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	14.684.400.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1320 perkara	1.671.690.000
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1320 perkara	6.967.995.000
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1321 perkara	324.715.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	5.465.000.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	200.000.000
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	8.096.680.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati</p> <p>Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W/II</p>	<p>3 perkara</p> <p>6 perkara</p> <p>19 kasus</p> <p>19 Perkara</p> <p>10 Perkara</p> <p>3 perkara</p> <p>5 perkara</p>	<p>150.000.000</p> <p>600.000.000</p> <p>950.000.000</p> <p>1.900.000.000</p> <p>825.000.000</p> <p>3.344.230.000</p> <p>220.950.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p> <p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p>	<p>1 perkara</p> <p>25 perkara</p>	<p>25.000.000</p> <p>81.500.000</p>	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	352.035.000	KAJATI	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari 	<p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)</p>	<p>9 perkara</p> <p>58 perkara</p>	<p>109.035.000</p> <p>174.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			<ul style="list-style-type: none">Operasional Pos Pelayanan Hukum	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	132 perkara	69.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	124.435.000.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	667.956.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	34.251.534.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	12 Sarana/ Prasarana	34.251.534.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	382.059.000	KAJATI

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	12 Kegiatan 20 Lapdu 5 Lapdu	276.759.000 68.000.000 37.300.000	KAJATI/KAJA R DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.390.716.000	KEJATI/KEJARI/DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Laporan 14 Laporan 41 Laporan	53.016.000 190.960.000 372.220.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	11 Laporan	159.500.000	
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 Kegiatan	100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 Kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	23 Kegiatan	217.580.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	46 Kegiatan	276.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	20 Kegiatan	500.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	15.152.000.000	KAJATI
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	62 Kegiatan	483.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1,115 perkara	2.814.910.000	KAJATI/ KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1,115 perkara	5.934.730.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1,116 perkara	682.360.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	5.465.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	10 perkara	200.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktnya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	8.546.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 Perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 Perkara	300.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	15 Perkara	750.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	16 Perkara	1.600.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	4 Perkara	50.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	3 Perkara	651.230.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W/II	3 Perkara	132.570.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN				
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	336.920.000	KAJATI			
							Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	24 Perkara	4.812.000.000
							Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	21 Perkara	50.200.000			
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha		<ul style="list-style-type: none"> Terseleksikannya Penanganan 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	8 Perkara	96.920.000	KAJATI/		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<p>perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari</p> <ul style="list-style-type: none"> • terseleskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	<p>diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)</p> <p>Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis</p>	<p>59 Perkara</p> <p>120 Perkara</p>	<p>177.000.000</p> <p>63.000.000</p>	<p>KAJARI DAN KACABJARI</p>

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BALI

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	92.215.446.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	823.290.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	91.392.156.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	1.033.376.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	270.020.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	4 kegiatan 25 Lapdu	115.820.000 85.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.206.876.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4 laporan 10 laporan	53.016.000 136.400.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	33 laporan	320.380.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	11 laporan	159.500.000	
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	19 Kegiatan	179.740.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	42 kegiatan	252.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	20 kegiatan	500.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	60 kegiatan	468.000.000	
				-	-	11.108.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1,905 perkara	4.717.610.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1,905 perkara	5.003.425.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1,906 perkara	528.965.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3 perkara	7.350.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	3 perkara	819.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	3 perkara	30.900.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	5.859.550.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati</p> <p>Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII</p>	<p>5perkara</p> <p>13 perkara</p> <p>14 kasus</p> <p>17 Perkara</p> <p>13 Perkara</p> <p>3 Perkara</p> <p>3 perkara</p>	<p>250.000.000</p> <p>1.300.000.000</p> <p>700.000.000</p> <p>1.700.000.000</p> <p>162.500.000</p> <p>389.140.000</p> <p>927.990.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	5 perkara	237.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	1 perkara	96.500.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	18 perkara	46.420.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	334.035.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	9 perkara	109.035.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	54 perkara	162.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	120 media	63.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	56.174.821.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	873.250.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	8.347.758.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	8.347.758.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Peningkatan dan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	199.300.000	KAJATI

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jajaran Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	2 Kegiatan	60.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30 Lapdu	102.000.000	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	5 Lapdu	37.300.000	
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.626.736.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi	3 Laporan	53.016.000	
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	6 Laporan	81.840.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	22 Laporan	223.720.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	8 Laporan	116.000.000	
				Burou tindak pidana/DPO yang ditangkap	2 Kegiatan	100.000.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 Kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	12 Kegiatan	113.520.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	32 Kegiatan	192.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	14 Kegiatan	350.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	46 Kegiatan	358.800.000	
					-	8.516.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.100 Perkara	2.749.100.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.100 Perkara	3.524.375.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, ekshaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1.101 Perkara	526.525.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 Perkara	16.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 Perkara	1.639.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	6 Perkara	60.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa 	-	-	4.147.840.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 				
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	3 Perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	7 Perkara	700.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8 Perkara	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejari/Cabjari	10 Perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	8 Perkara	400.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	8 Perkara	403.280.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	6 Perkara	265.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII.II	5 Perkara	237.000.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII.III	7 Perkara	721.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 Perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	17 Perkara	21.420.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	255.920.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesainya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	8 Perkara 38 Perkara 84 Perkara	96.920.000 114.000.000 45.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI NTT.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	82.656.297.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	775.012.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	81.881.285.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	5 Sarana/ Prasarana	69.583.171.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	452.890.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	<p>Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>23 kegiatan</p> <p>20 Lapdu</p> <p>5 Lapdu</p>	<p>347.590.000</p> <p>68.000.000</p> <p>37.300.000</p>	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantaran) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	<p>Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari</p>	-	3.907.416.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	<p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>3 laporan</p> <p>19 laporan</p> <p>59 laporan</p>	<p>53.016.000</p> <p>259.160.000</p> <p>556.540.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		ALOKASI ANGGARAN
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelecaakan Aset di Kejati dan Kejari	19 laporan	275.500.000	
				Buron tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	4 kegiatan	37.840.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	36 Kegiatan	340.560.000	
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	80 kegiatan	480.000.000	
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	36 kegiatan	900.000.000	
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	116 kegiatan	904.800.000	
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 	-	-	14.340.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<p>bidang Pidana Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Pengendalian penggunaan upaya hukum, ekaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari</p>	<p>1.745 perkara</p> <p>1.745 perkara</p> <p>1.746 perkara</p> <p>10 perkara</p> <p>10 perkara</p> <p>10 perkara</p>	<p>3.033.600.000</p> <p>7.911.740.000</p> <p>534.660.000</p> <p>27.500.000</p> <p>2.732.500.000</p> <p>100.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa 	-	17.827.290.000	KAJATI	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
		RI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 				
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	5 perkara	250.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	8 perkara	800.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	25 Perkara	1.250.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	33 Perkara	3.300.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	15 Perkara	1.187.500.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	4 perkara	189.140.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di	2 perkara	309.330.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Kejari/Cabjari Wil.I			
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	52 perkara	10.426.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	33 perkara	65.320.000	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	63 perkara 95 media 216 perkara	315.000.000 285.000.000 111.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI PAPUA.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	67.795.337.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	870.774.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	66.924.563.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	12 Sarana/ Prasarana	57.717.394.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	385.236.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	3 kegiatan 20 Lapdu	310.485.000 67.201.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.565.056.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 11 laporan 37 laporan	53.016.000 150.040.000 363.220.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	13 laporan	188.500.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditanggakap	2 kegiatan	130.320.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	4 kegiatan 22 Kegiatan 48 kegiatan 24 kegiatan 70 kegiatan	37.840.000 208.120.000 288.000.000 600.000.000 546.000.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	20.222.270.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.313 perkara	4.585.235.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.323 perkara	8.901.935.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1.324 perkara	1.015.100.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	59.900.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	19 perkara	5.460.100.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	19 perkara	200.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	12.306.340.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	150.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
			Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	4 perkara	500.000.000		
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	14 Perkara	1.050.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	17 Perkara	2.125.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	6 Perkara	1.659.440.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	3 perkara	1.659.440.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil	4 perkara	525.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	24 perkara	6.000.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	28 perkara	57.760.000
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha		<ul style="list-style-type: none"> Terseleksikannya Penanganan 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	8 perkara	96.920.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
	Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> • terseleskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum 	diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	63 perkara	315.000.000	DAN KACABJARI
					144 media	75.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	53.085.548.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	677.236.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	52.408.312.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	10.852.263.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	178.300.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	8 kegiatan 30 Lapdu	39.000.000 102.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	2.214.016.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 9 laporan	53.016.000 122.760.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	31 laporan	307.420.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	11 laporan	159.500.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditangkakp	2 kegiatan	100.000.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	4 kegiatan 18 Kegiatan	37.840.000 170.280.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	44 kegiatan	264.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	20 kegiatan	500.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	64 kegiatan	499.200.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	14.236.000.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.665 perkara	2.507.350.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	1.690 perkara	5.338.600.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1.691 perkara	670.050.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	5.465.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	200.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktnya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	4.787.410.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati</p> <p>Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.</p>	<p>3 perkara</p> <p>3 perkara</p> <p>14 kasus</p> <p>15 Perkara</p> <p>5 Perkara</p> <p>3 perkara</p> <p>4 perkara</p>	<p>150.000.000</p> <p>300.000.000</p> <p>700.000.000</p> <p>1.500.000.000</p> <p>562.500.000</p> <p>151.230.000</p> <p>176.760.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	14 perkara	663.600.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	6 perkara	493.200.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	13 perkara	40.120.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	334.035.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	9 perkara	109.035.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	54 perkara	162.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	120 media	63.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	42.091.837.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	492.856.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	41.598.981.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	6.237.268.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	207.650.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejaringan Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	2 kegiatan 12 Lapdu	102.350.000 68.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.936.156.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 8 laporan	53.016.000 109.120.000	
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri 	Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	27 laporan	264.580.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	9 laporan	130.500.000	
				Burton tindak pidana/DPO yang ditanggakap	2 kegiatan	100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	<p>4 kegiatan</p> <p>15 Kegiatan</p> <p>38 kegiatan</p> <p>11 kegiatan</p> <p>54 kegiatan</p>	<p>37.840.000</p> <p>141.900.000</p> <p>228.000.000</p> <p>450.000.000</p> <p>421.200.000</p>	<p>KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI</p>
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	11.440.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	637 perkara	2.580.550.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	577 perkara	2.823.950.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	578 perkara	315.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	5.465.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	200.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktnya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	5.997.590.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	10 perkara	550.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	6 perkara	600.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	50.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	10 Perkara	1.000.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	6 Perkara	575.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	3 Perkara	151.230.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	4 perkara	176.760.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan	14 perkara	2.807.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				<p>pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wvl.III</p> <p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p> <p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p>	<p>1 perkara</p> <p>11 perkara</p>	<p>50.000.000</p> <p>37.600.000</p>	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	297.920.000	KAJATI	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			Kejati, Kejari maupun Cabjari Penanganannya • Terselenggaranya Tata Usaha Negara dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari • Operasional Pos Pelayanan Hukum	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	48 perkara	144.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	108 perkara	57.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BANTEN.

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	67.715.680.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	483.876.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	67.231.704.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	3.523.925.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	139.950.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	3 kegiatan 12 Lapdu	34.650.000 68.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.751.696.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/ Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	7 laporan 3 laporan	107.576.000 40.920.000	
				Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	25 laporan	251.620.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	9 laporan	130.500.000
				Burton tindak pidana/DPO yang ditanggakap	2 kegiatan	100.000.000
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.	12 kegiatan	113.520.000
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari	6 Kegiatan	56.760.000
				Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah	32 kegiatan	192.000.000
				Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.	16 kegiatan	400.000.000
				Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	46 kegiatan	358.800.000
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-		KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.405 perkara	2.848.840.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2.454 perkara	8.504.798.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	2.455 perkara	648.362.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	5.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	546.500.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	2 perkara	20.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	4.215.580.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati</p> <p>Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil</p>	<p>2 Perkara</p> <p>2 Perkara</p> <p>12 Kasus</p> <p>15 Perkara</p> <p>4 Perkara</p> <p>8 perkara</p> <p>2 perkara</p>	<p>100.000.000</p> <p>200.000.000</p> <p>600.000.000</p> <p>1.500.000.000</p> <p>350.000.000</p> <p>403.280.000</p> <p>927.180.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p> <p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari</p>	<p>1 perkara</p> <p>13 perkara</p>	<p>50.000.000</p> <p>40.120.000</p>	
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	252.690.000	KAJATI	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di 	<p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/</p>	<p>6 perkara</p> <p>43 perkara</p>	<p>72.690.000</p> <p>129.000.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
			Kejati, Kejari maupun Cabjari <ul style="list-style-type: none"> Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Cabjari (Non litigasi) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	96 media	51.000.000

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	50.559.450.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	2.187.226.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	48.372.224.000	KACABJARI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	5.253.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	161.118.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	4 kegiatan 15 Lapdu	55.818.000 49.500.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.886.156.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksanaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 laporan 8 laporan 27 laporan	53.016.000 109.120.000 264.580.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	9 laporan	130.500.000	
				Burton tindak pidana/DPO yang ditanggakap	2 kegiatan	100.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari/Cabjari</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	<p>4 kegiatan</p> <p>15 Kegiatan</p> <p>38 kegiatan</p> <p>16 kegiatan</p> <p>54 kegiatan</p>	<p>37.840.000</p> <p>141.900.000</p> <p>228.000.000</p> <p>400.000.000</p> <p>421.200.000</p>	<p>KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI</p>
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	11.850.000.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	955 perkara	749.200.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	950 perkara	5.543.000.000	
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	951 perkara	1.267.800.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	20 perkara	55.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	15 perkara	4.085.000.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	15 perkara	150.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktnya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara 	-	-	3.962.090.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		<p>Pidana Khusus sesuai KUHAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi</p> <p>Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati</p> <p>Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII</p>	<p>3 perkara</p> <p>3 perkara</p> <p>10 kasus</p> <p>12 Perkara</p> <p>5 Perkara</p> <p>3 Perkara</p> <p>4 perkara</p>	<p>150.000.000</p> <p>300.000.000</p> <p>500.000.000</p> <p>1.200.000.000</p> <p>62.500.000</p> <p>151.230.000</p> <p>176.760.000</p>	<p>KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI</p>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	10 perkara	474.000.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	4 perkara	360.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	1 perkara	50.000.000
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	13 perkara	537.600.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	255.690.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	6 perkara	72.690.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	44 perkara	132.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	96 Perkara	51.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	39.291.523.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	255.163.000	KAJATI/KAJARI DAN
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	10.676.641.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	10.676.641.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	161.701.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara di daerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	6 kegiatan 20 Lapdu	76.401.000 58.000.000	KAJATI/KAJAR DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.626.736.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana	9 laporan 22 laporan 8 laporan	134.856.000 223.720.000 116.000.000	
				Burou tindak pidana/DPO	2 kegiatan	100.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	yang ditangkapi Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati. Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejati/Cabjari Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari. Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	4 kegiatan 16 Kegiatan 32 kegiatan 7 kegiatan 46 kegiatan	37.840.000 151.360.000 192.000.000 350.000.000 358.800.000	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang 	-	-	6.230.000.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	552 perkara	1.965.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
			Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	562 perkara	2.769.000.000
				Pengendalian penggunaan upaya hukum, ekaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	532 perkara	66.000.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5 perkara	13.750.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5 perkara	1.366.250.000
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	5 perkara	50.000.000
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbukanya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	-	3.076.550.000
						KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	5perkara	250.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	150.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	3 perkara	300.000.000	
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	7 perkara	350.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	8 Perkara	800.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	10 Perkara	425.000.000	
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari	3 perkara	151.230.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari W/II	3 perkara	353.520.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.II	3 perkara	142.200.000	
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari Wil.III	4 perkara	321.000.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	2 perkara	55.040.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	4 perkara	28.780.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	-	-	231.690.000	KAJATI
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	6 perkara	72.690.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/ Kejari/ Cabjari (Non litigasi)	38 perkara	114.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	84 perkara	45.000.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standard kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Indeks kepuasan pelayanan internal 	-	-	49.020.071.000	KAJATI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.241.320.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan RI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	-	-	15.762.400.000	KAJATI
1091	Sarana dan prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatour Kejaksaan di daerah, Operasional roda 4, Kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik dipusat maupun didaerah	Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah	1 Sarana/ Prasarana	15.762.400.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan masyarakat (Lapdu) Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP 	-	-	284.200.000	KAJATI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan jejarian Pengawasan di Daerah.		Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara didaerah	Pelaksanaan Inspeksi Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejari yang terdapat Cabjari	5 kegiatan 5 Lapdu	233.800.000 16.100.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
006.01.06	Program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdara dan Tata Usaha Negara Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai 	Program penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	1.746.916.000	KEJATI/KEJARI/ DAN CABJARI
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Pidana Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana 	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari Buron tindak pidana/DPO yang ditangkap	12 laporan 28 laporan 8 laporan 2 kegiatan	175.776.000 262.600.000 116.000.000 100.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N				PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN dan TP4D 	<p>Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejati.</p> <p>Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah</p> <p>Penguatan Jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari.</p> <p>Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)</p>	<p>19 kegiatan</p> <p>34 kegiatan</p> <p>13 kegiatan</p> <p>46 kegiatan</p>	<p>179.740.000</p> <p>204.000.000</p> <p>350.000.000</p> <p>358.800.000</p>	KEJATI/KEJARI DAN KACABJARI
006.01.07	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Umum Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum 	-	-	23.200.500.000	KAJATI
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri 	<p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p> <p>Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari</p>	<p>1.292 perkara</p> <p>1.292 perkara</p>	<p>3.526.550.000</p> <p>4.882.745.000</p>	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
			dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejati/Kejari/ Cabjari	1, 293 perkara	491.205.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	5 perkara	18.250.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejati/Kejari/Cabjari	44 perkara	13.781.750.000	
				Perkara Pidana Umum Tertentu yang diselesaikan dalam tahap Eksekusi pada Kejati/Kejari/Cabjari	44 perkara	500.000.000	
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktnya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian Tindak Pidana Khusus Persentase putusan Pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai KUHAP Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus 	-	8.152.900.000	KAJATI	
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari			Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	100.000.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	
			Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah perkara tindak pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	2 perkara	200.000.000
				Kasus Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	19 kasus	950.000.000
				Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejari/Cabjari	20 Perkara	2.000.000.000
				Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejati	3 Perkara	1.348.500.000
				Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari	3 Perkara	151.230.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII	2 perkara	309.330.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII.II	2 perkara	94.800.000
				Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejari/Cabjari WII.III	12 perkara	2.906.400.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
006.01.09	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabjari	15 perkara	92.640.000	
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.		<ul style="list-style-type: none"> Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Terselekskannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Operasional Pos Pelayanan Hukum 	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Litigasi)	8 perkara	96.920.000	KAJATI/KAJARI DAN KACABJARI
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari/Cabjari (Non litigasi)	41 perkara	123.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN	S A S A R A N			ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	OUTPUT	VOLUME/ SATUAN		
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	84 Perkara	45.000.000	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO